



**PENGARUH ANGGARAN BERBASIS KINERJA,
AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA MEDAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh:

**DELEFIDA SARY SIMORANGKIR
1715100528**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**



FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : DELEFIDA SARY SIMORANGKIR
NPM : 1715100528
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : S1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH ANGGARAN BERBASIS
KINERJA, AKUNTABILITAS DAN
TRANSPARANSI TERHADAP KINERJA
KEUANGAN PEMERINTAH KOTA MEDAN

MEDAN, DESEMBER 2021

KETUA PROGRAM STUDI

(Dr. Oktarini Khamilah Siregar, SE., M.Si)

DEKAN



(Dr. Onny Medaline, SH., MKn)

PEMBIMBING I

(Dr. Rahima Br Purba, SE., M.Si., Ak., CA)

PEMBIMBING II

(Dra. Mariyam, Ak., M.Si., CA)



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

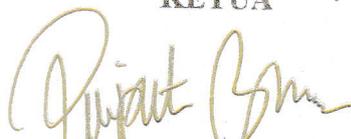
SKRIPSI DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH
PANITIA UJIAN SARJANA LENGKAP FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCABUDI

PERSETUJUAN UJIAN

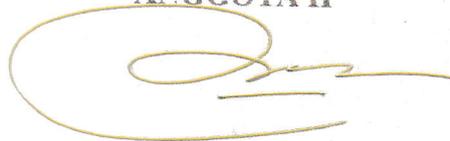
NAMA : DELEFIDA SARY SIMORANGKIR
NPM : 1715100528
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : S1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH ANGGARAN BERBASIS
KINERJA, AKUNTABILITAS DAN
TRANSPARANSI TERHADAP KINERJA
KEUANGAN PEMERINTAH KOTA MEDAN

MEDAN, DESEMBER 2021

KETUA


(Pipit Buana Sari, SE, MM)

ANGGOTA II


(Dra. Mariyam, Ak., M.Si., CA)

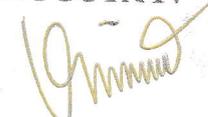
ANGGOTA I


(Dr. Rahima Br Purba, SE., M.Si., Ak., CA)

ANGGOTA III


(Dr. Oktarini Khamilah Siregar, SE., M.Si)

ANGGOTA IV


(Vina Arnita, SE., M.Si)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DELEFIDA SARY SIMORANGKIR
Npm : 1715100528
Fakultas/Program Studi : SOSIAL SAINS /AKUNTANSI
Judul Skripsi : PENGARUH ANGGARAN BERBASIS
KINERJA, AKUTABILITAS DAN
TRANSPARANSI TERHADAP KINERJA
KEUANGAN PEMERINTAH KOTA MEDAN

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan izin bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Universitas Pembangunan Panca Budi Medan untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsi saya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensinya apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.



Medan, Desember 2021

Delefida Sary Simorangkir
NPM: 1715100528



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

JL. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808

MEDAN - INDONESIA

Website : www.pancabudi.ac.id - Email : admin@pancabudi.ac.id

LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : DELEFIDA SARY SIMORANGKIR
NPM : 1715100528
Program Studi : Akuntansi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu
Dosen Pembimbing : Dra Mariyam, Ak, MSi., CA
Judul Skripsi : Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
18 Agustus 2021	ACC Seminar Proposal	Disetujui	
17 November 2021	Acc sidang meja hijau	Disetujui	
17 Januari 2022	ACC jilid lux	Disetujui	
17 Januari 2022	ACC jilid lux	Disetujui	
17 Januari 2022	ACC jilid lux	Disetujui	

Medan, 26 Januari 2022
Dosen Pembimbing,



Dra Mariyam, Ak, MSi., CA



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

JL. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808
MEDAN - INDONESIA

Website : www.pancabudi.ac.id - Email : admin@pancabudi.ac.id

LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : DELEFIDA SARY SIMORANGKIR
NPM : 1715100528
Program Studi : Akuntansi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu
Dosen Pembimbing : Dr Rahima br. Purba, SE., M.Si., Ak., CA.
Judul Skripsi : Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
02 Agustus 2021	ACC Sempro	Disetujui	
05 November 2021	ACC Sidang	Disetujui	
14 Januari 2022	ACC Jilid Lux	Disetujui	

Medan, 26 Januari 2022
Dosen Pembimbing,



Dr Rahima br. Purba, SE., M.Si., Ak., CA.

SURAT PERNYATAAN
PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama : DELEFIDA SARY SIMORANGKIR
NPM : 1715100528 -
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

menyatakan benar bahwa judul skripsi saya mengalami perubahan sesuai dengan arahan dari dosen pembimbing saya. Judul skripsi saya pertama yang telah disetujui adalah :

“ Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan”

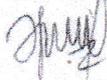
dan judul skripsi saat ini setelah diubah adalah :

“ Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja, Akuntabilitas, dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan”

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya.

MEDAN, 05 NOVEMBER 2021

Dibuat oleh,

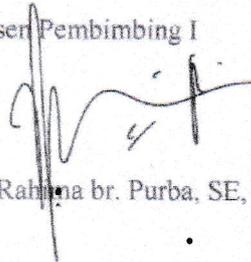


DELEFIDA SARY SIMORANGKIR

NPM. 1715100528

Diketahui oleh,

Dosen Pembimbing I



Dr Rahma br. Purba, SE, M.Si., Ak, CA.

Dosen Pembimbing II



Dra. Mariyam, Ak, M.Si., CA

SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa saurat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.



No. Dokumen : PM-UJMA-06-02

Revisi : 00

Tgl Eff : 23 Jan 2019



Plagiarism Detector v. 1921 - Originality Report 11/19/2021 9:00:34 AM

Analyzed document: DELEFIDA SARY SIMORANGKIR_1715100528_AKUNTANSI.docx Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License03

Comparison Preset: Rewrite Detected language: Id

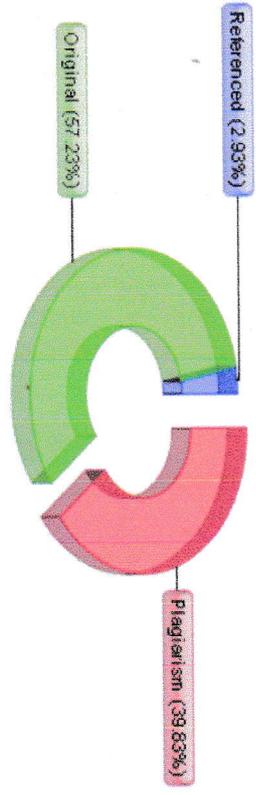
Check type: Internet Check

[tee_and_enc_string] [tee_and_enc_value]



Detailed document body analysis:

Relation chart:



Distribution graph:





YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122

SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 884/PERP/BP/2021

Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan
nama saudara/i:

: DELEFIDA SARY SIMORANGKIR
: 1715100528
at/Semester : Akhir
as : SOSIAL SAINS
an/Prodi : Akuntansi

sannya terhitung sejak tanggal 12 November 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku
tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 12 November 2021
Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan



Rahmad Budi Utomo, ST.,M.Kom

Dokumen : FM-PERPUS-06-01

si : 01

Efektif : 04 Juni 2015

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : DELEFIDA SARY SIMORANGKIR
Tempat / Tanggal Lahir : Simorangkir / 16-12-1997
NPM : 1715100528
Fakultas : Sosial Sains
Program Studi : Akuntansi
Alamat : MARSAIT BOSI DESA SIMORANGKIR JULU
KECAMATAN SIATAS BARITA

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains

Universitas Pembangunan Panca Budi.

Sehubungan dengan hal ini tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 26 Januari 2022

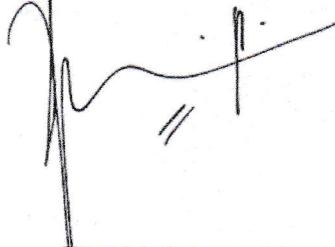
Yang membuat pernyataan



DELEFIDA SARY SIMORANGKIR

Acc jilid lux

14/01-2022



Acc. jilid lux
17/1/2022
Kharigan

**PENGARUH ANGGARAN BERBASIS KINERJA,
AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA MEDAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh:

**DELEFIDA SARY SIMORANGKIR
1715100528**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**

Permohonan Meja Hijau

Medan, 18 November 2021
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
Fakultas SOSIAL SAINS
UNPAB Medan
DI -
Tempat

Yang hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DELEFIDA SARY SIMORANGKIR
Tempat/Tgl. Lahir : SIMORANGKIR / 16 Desember 1997
Nama Orang Tua : TINJUNGAN SIMORANGKIR
P. M : 1715100528
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Akuntansi
No. HP : 085276714369
Alamat : Jl. Setia Budi No 176 Tanjung Rejo, Medan Sunggal

Yang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Jjudul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	1,000,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,750,000
Total Biaya	: Rp.	2,750,000

Ukuran Toga :

M

Diketahui/Disetujui oleh :

Hormat saya



Delefid Sary Simorangkir, S.H., M.Kn
Fakultas SOSIAL SAINS



DELEFIDA SARY SIMORANGKIR
1715100528

1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - o a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - o b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.

Permohonan Meja Hijau

Medan, 18 November 2021
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
Fakultas SOSIAL SAINS
UNPAB Medan
DI -
Tempat

Yang hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DELEFIDA SARY SIMORANGKIR
Tempat/Tgl. Lahir : SIMORANGKIR / 16 Desember 1997
Nama Orang Tua : TINJUNGAN SIMORANGKIR
P. M : 1715100528
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Akuntansi
No. HP : 085276714369
Alamat : Jl. Setia Budi No 176 Tanjung Rejo, Medan Sunggal

Yang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan, Selanjutnya saya menyatakan :

- Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
- Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
- Telah tercap keterangan bebas pustaka
- Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
- Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
- Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
- Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
- Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
- Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Jjudul Skripsinya)
- Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
- Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
- Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	1,000,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,750,000
Total Biaya	: Rp.	2,750,000

Ukuran Toga :

M

Ditandai/Ditandatangani oleh :

Hormat saya



DELEFIDA SARY SIMORANGKIR
Fakultas SOSIAL SAINS



DELEFIDA SARY SIMORANGKIR
1715100528

- Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.

FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fakultas Ekonomi UNPAB, Jl. Jend. Gatot Subroto Km, 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
PROGRAM STUDI MANAJEMEN
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN

(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Pertanda tangan di bawah ini :

Nama

: DELEFIDA SARY SIMORANGKIR

Tgl. Lahir

: SIMORANGKIR / 16 Desember 1997

Nomor Mahasiswa

: 1715100528

Program Studi

: Akuntansi

Instansi

: Akuntansi Sektor Publik

Revisi yang telah dicapai

: 144 SKS, IPK 3.58

Permohonan mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut

: 085276714369

Judul

PENGARUH PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA MEDANO

Disetujui Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

Disetujui Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul



Rektor I,

(Cahya Pramono, S.E., M.M.)

Medan, 02 Agustus 2021

Pemohon,

(Delefida Sary Simorangkir)

Tanggal :



Disahkan oleh
Dean

(Dr Onny Medaline, SH., M.Kr)

Tanggal :

Disetujui oleh:
Ka. Prodi Akuntansi

(Dr Rahima br. Purba, SE., M.Si., Ak., CA.)

Tanggal :

Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing I :

(Dr Rahima br. Purba, SE., M.Si., Ak., CA.)

Tanggal :

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing II:

(Dra Mariyam, Ak, MSi., CA)

No. Dokumen: FM-UPBM-18-02

Revisi: 0

Tgl. Eff: 22 Oktober 2018

Sumber dokumen: <http://mahasiswa.pancabudi.ac.id>

Dicetak pada: Senin, 02 Agustus 2021 12:51:23

ABSTRAK

Kinerja keuangan adalah kesanggupan pemerintah dalam mengelola keuangan yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam membiayai kebutuhan pemerintah, pembangunan serta pelayanan sosial (Halim, 2012). Kinerja keuangan pemerintah berkaitan erat dengan anggaran berbasis kinerja, akuntabilitas dan transparansi. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris mengenai pengaruh anggaran berbasis kinerja, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja keuangan pemerintah Kota Medan. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif bersifat asosiatif yang menggambarkan derajat hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Penelitian ini meneliti 30 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Pemerintahan Kota Medan dengan melihat jawaban dari pernyataan responden sebanyak 60 yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di masing-masing Instansi. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, dimana metode tersebut mengambil sampel dengan menggunakan kriteria tertentu. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel anggaran berbasis kinerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah Kota Medan, akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah Kota Medan dan transparansi berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah Kota Medan. hasil uji secara keseluruhan menunjukkan bahwa, anggaran berbasis kinerja, akuntabilitas dan transparansi secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah Kota Medan.

Kata Kunci: Anggaran Berbasis Kinerja, Akuntabilitas, Transparansi dan Kinerja Keuangan Pemerintah

ABSTRACT

Financial performance is the government's ability to manage finances as outlined in the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) in financing government needs, development and social services (Halim, 2012). Government financial performance is closely related to performance-based budgeting, accountability and transparency. This study aims to prove empirically the effect of performance-based budgeting, accountability and transparency on the financial performance of the Medan City government. This type of research is quantitative associative which describes the degree of relationship between the independent variable and the dependent variable. This study examines 30 Regional Apparatus Work Units (SKPD) in the Medan City Government by looking at the answers from 60 respondents' statements, namely State Civil Apparatus (ASN) who work in each agency. sampling technique using purposive sampling method, where the method takes samples using certain criteria. The results of this study indicate that the performance-based budget variable has a significant effect on the financial performance of the Medan City government, accountability has a significant effect on the Medan City government's financial performance and transparency has an effect on the Medan City government's financial performance. The overall test results show that performance-based budgeting, accountability and transparency together have an effect on the financial performance of the Medan City government.

Keywords: Performance-Free Budgeting, Accountability, Transparency and Government Financial Performance

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja, Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan”**.

Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih gelar sarjana Strata Satu (S-1) Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Selama penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari kendala. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE, MM selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu Dr. Onny Medaline, SH., MKn selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Ibu Dr. Oktarini Khamilah Siregar, SE., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Ibu Dr. Rahima Br. Purba, SE., M.Si., Ak., CA selaku dosen pembimbing 1 (satu) yang sudah banyak memberikan kritik dan saran terhadap perbaikan skripsi saya.
5. Ibu Dra. Mariyam, Ak, M.Si., CA Selaku dosen pembimbing 2 (dua) yang sudah banyak memberikan kritik dan saran terhadap perbaikan skripsi saya.

6. Terkhusus kepada keluarga besar penulis, Ayahanda Tinjungan Simorangkir yang telah damai bersama Tuhan disurga dan Ibunda tercinta Nurmawan Sianturi yang hebat yang selalu memberikan nasihat, doa, mendukung penulis melakukan hal yang terbaik, memberikan perhatian dan kasih sayang kepada penulis, Abang penulis Pahothon Martogi Simorangkir, Adik penulis Desliani Natalia Simorangkir dan Yenni Laura Simorangkir yang menjadi tempat berbagi suka dan duka dan selalu memberikan dukungan terhadap penulis.
7. Bapak/ Ibu Dosen Universitas Pembangunan Panca Budi Medan terkhusus Bapak/Ibu dosen Fakultas Sosial Sains yang telah memberikan ilmu dan bimbingan selama penulis dibangku kuliah sampai dengan selesai serta seluruh pegawai Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
8. Sahabat penulis Bella Sihombing yang selalu mendukung, memberikan semangat dan saran kepada penulis dalam menyempurnakan skripsi ini.
9. Teman seperjuangan Mahasiswa/i di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang telah banyak memberikan saran dan masukan kepada penulis dalam menyempurnakan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu segala kritik dan saran untuk penyempurnaan skripsi ini sangat diharapkan penulis. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Medan, Desember 2021

Delefida Sary Simorangkir
NPM: 1715100528

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	40
Gambar 4.1 Grafik Histogram.....	63
Gambar 4.2 Grafik P-Plot.....	63
Gambar 4.3 Grafik <i>Scatter Plot</i>	65

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	7
1.3 Rumusan Masalah	8
1.4 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	8
1.4.1 Tujuan Penelitian.....	8
1.4.2 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Keaslian Penelitian	9
BAB II : LANDASAN TEORI	
2.1 Landasan Teori	11
2.2 Penelitian Terdahulu.....	37
2.3 Kerangka Konseptual	39
2.4 Hipotesis	41
BAB III : METODE PENELITIAN	
3.1 Pendekatan Penelitian.....	42
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	42
3.3 Populasi dan sampel / Jenis dan Sumber Data	43
3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	46
3.5 Teknik Pengumpulan Data	48
3.6 Teknik Analisis Data	49
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Hasil Penelitian.....	56
4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	56
4.1.2 Karakteristik Responden	58
4.1.3 Uji Validitas dan Reliabilitas	60
4.1.4 Uji Asumsi Klasik	63
4.1.5 Analisis Regresi Linear Berganda	66
4.1.6 Uji Hipotesis.....	68
4.1.7 Koefisien Determinasi	70
4.2 Pembahasan	71

BAB V	: KESIMPULAN DAN SARAN	
	5.1 Kesimpulan.....	77
	5.1 Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN		
BIODATA		

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Realisasi Anggaran Pendapatan Kota Medan	6
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	37
Tabel 3.1 Jadwal Penelitian.....	43
Tabel 3.2 Sampel Penelitian.....	44
Tabel 3.3 Definisi Operasional Variabel.....	47
Tabel 4.1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	59
Tabel 4.2 Responden Berdasarkan Pendidikan	59
Tabel 4.3 Responden Berdasarkan Usia.....	59
Tabel 4.4 Responden Berdasarkan Masa Kerja.....	60
Tabel 4.5 Uji Validitas Anggaran Berbasis Kinerja.....	61
Tabel 4.6 Uji Validitas Akuntabilitas.....	61
Tabel 4.7 Uji Validitas Transparansi.....	61
Tabel 4.8 Uji Validitas Kinerja Keuangan Pemerintah.....	62
Tabel 4.9 Uji Reabilitas.....	62
Tabel 4.10 Uji Normalitas <i>Kolmogorov-Smirnov</i>	64
Tabel 4.11 Uji Multikolinearitas <i>Tolance</i> dan VIF	65
Tabel 4.12 Uji Autokorelasi	66
Tabel 4.13 Uji Regresi Linear Berganda.....	67
Tabel 4.14 Uji Parsial (Uji-t).....	68
Tabel 4.15 Uji Simultan (Uji-F)	70
Tabel 4.16 Koefesien Determinasi R^2	71

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia semakin membawa perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan adanya era reformasi. Akuntansi sektor publik adalah suatu metode akuntansi yang dipakai oleh lembaga publik sebagai salah satu pertanggungjawaban kepada publik. Di era saat ini praktek akuntansi yang dilakukan oleh lembaga publik mendapat perhatian yang besar, baik pada akuntansi sektor pemerintahan maupun lembaga publik non-pemerintah. Masyarakat menuntut agar mengelola keuangannya secara akuntabel, transparan, dan bertanggungjawab.

Perkembangan Anggaran sektor publik di Indonesia terjadi setelah dilakukannya reformasi sektor publik di berbagai Negara. Anggaran yang pertama diterapkan adalah *Line Item Budgeting* atau sering disebut anggaran tradisional, pada anggaran ini menyajikan belanja berdasarkan *input* yang digunakan dan kelemahan dari anggaran ini yaitu tidak ada mengaitkan *input* dengan *output* sehingga anggaran ini berfokus dengan *input* tetapi tidak mengukur efisiensi dan efektifitas program. Kedua, *Incremental Budgeting* yaitu penganggaran yang hanya menambah dan mengurangi jumlah anggaran dari tahun sebelumnya yang digunakan untuk perencanaan tahun berikutnya. Ketiga, *Planning Programming Budgeting System* yaitu sistem penganggaran yang disusun hanya berdasarkan program kerja. Keempat yaitu *Zero Based Budgeting* yang merupakan penganggaran yang berbasis nol atau dimulai dari nol. Kelima yaitu *Performance Based Budgeting* yang merupakan metode penganggaran yang dilakukan dengan

memperhatikan hubungan antara *input* dengan *output* serta *outcome* yang diharapkan dari suatu kegiatan atau program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut (Mauro, dkk, 2017).

Pemerintahan Indonesia saat ini sudah menerapkan sistem Penganggaran Berbasis Kinerja (*Performance Based Budgeting*). Anggaran berbasis kinerja merupakan sistem yang mencakup kegiatan penyusunan program dan tolak ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran program, serta anggaran berbasis kinerja dapat menyatukan perencanaan kinerja dengan anggaran tahunan agar terlihat hubungan antara dana yang tersedia dengan hasil yang diharapkan (Akbar, 2018).

Pemerintah Kota Medan adalah salah satu pemerintahan daerah di Sumatera utara yang sudah menerapkan penganggaran berbasis kinerja. Dengan pemberlakuan anggaran berbasis kinerja, setiap biaya yang dikeluarkan Pemerintah Kota Medan harus memiliki hasil dan manfaat untuk pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan untuk rakyat. Selain itu Pemerintah Kota Medan harus menunjukkan akuntabilitas dengan melaporkan hasil dari kegiatan yang dilakukan dan menyampaikan informasi dengan transparan. Oleh karena itu, pemerintah harus menyiapkan ruang atau tempat agar publik dapat mengakses dokumen publik dengan mudah.

Kelangsungan kesejahteraan masyarakat berkaitan erat dengan pengelolaan anggaran, semakin baik pengelolaan anggaran maka kelangsungan kesejahteraan masyarakat semakin baik juga. Pengelolaan anggaran yang baik harus dilakukan dengan pengawasan oleh atasan langsung pengguna anggaran tersebut, badan legislatif serta pengawas khusus yang bertugas mengatur perencanaan dan

pengendalian anggaran. Pengawasan harus dilakukan untuk mengontrol setiap anggaran yang disusun agar dapat berjalan secara efisien, efektif, dan ekonomis.

Pengelolaan anggaran yang baik mutlak dilakukan dan merupakan prinsip *Value for Money*. Penerapan prinsip *Value for Money* diharapkan dapat memperbaiki kinerja sektor publik. Pengukuran kinerja dengan konsep *Value for Money* bertujuan untuk mengukur tingkat keekonomisan dalam pengalokasian sumber daya, penggunaan sumber daya yang efisien dengan hasil yang optimal serta efektifitas dalam penggunaan sumber daya. *Value for Money* dinilai baik apabila pemerintah sudah menggunakan *input* seminimal mungkin untuk mencapai *output* yang maksimal dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Pengelolaan anggaran berkaitan dengan *Value for Money* karena masih banyak pengelolaan anggaran yang belum dilakukan secara ekonomis (menggunakan biaya yang tinggi, hasil yang minim atau anggaran digunakan tidak berdasarkan pada kebutuhan atau skala prioritas, serta anggaran yang boros). SKPD merupakan elemen-elemen dari sektor publik yang selalu diamati terkait dengan pengelolaan anggaran yang tidak efisien. Salah satunya dapat terlihat pada pembangunan Taman Kota sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang ada di Kota Medan tetapi tidak fungsional dalam pemanfaatannya. Minimnya proporsi RTH pada Kota Medan semakin menjelaskan bahwa pemanfaatan anggaran tidak efisien dengan hasil yang minum dan anggaran yang boros.

SKPD-SKPD ini dituntut untuk meningkatkan pelayanan melalui pelaksanaan *Value for Money* dalam menjalankan atau melaksanakan setiap programnya. Setiap SKPD harus dapat mengatasi hal-hal yang menyebabkan pelaksanaan pengelolaan anggaran tidak terlaksana berdasarkan pada *Value for*

Money. Value for Money harus diimplementasikan dalam pengelolaan keuangan daerah karena dalam kerangka otonomi daerah, *Value for Money* merupakan pengantar untuk Pemerintah Daerah mencapai Pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Pada masa sekarang ini fenomena yang terjadi pada pengelolaan anggaran adalah semakin menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik dan transparansi publik oleh organisasi sektor publik, baik pusat maupun daerah. Akuntabilitas dan transparansi merupakan dasar yang menentukan setiap kegiatan dan hasil akhir dari pengelolaan anggaran dan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai kedaulatan tertinggi.

Akuntabilitas publik merupakan kewajiban pihak pemegang amanah untuk mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan, dan mengungkap keseluruhan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pemberi amanah yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Sedangkan transparansi adalah keterbukaan informasi, dimana seluruh proses pemerintahan, perlu diketahui dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, serta informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

Akuntabilitas dan transparansi diharapkan dapat tercipta dalam pengelolaan keuangan daerah. Laporan pertanggungjawaban merupakan bentuk dari akuntabilitas, transparansi, dan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran dalam pelayanan masyarakat. Akuntabilitas dan transparansi pemerintah mewajibkan setiap instansi pusat maupun daerah sampai eselon II untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), hal ini dapat dilihat pada Kepres No. 7 Tahun 1999. Keterbukaan informasi tentang kegiatan dan aktivitas Pemerintah Daerah, diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU-KIP).

Akan tetapi, berbagai masalah muncul yang kemudian menghambat lajunya pembangunan. Seperti yang dialami pemerintah daerah, terutama daerah-daerah yang kurang potensial baik sumber daya alamnya maupun sumber daya manusianya. Untuk itu, pemerintah daerah diharapkan dapat mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi pada masing-masing daerahnya. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengatasi hambatan yang muncul adalah dengan memperbaiki sistem pengelolaan keuangan yang ada di pemerintah daerah. Sistem pengelolaan keuangan yang baik dapat dilihat dari perencanaan penggunaan anggaran (Natalia, dkk, 2019).

Kinerja keuangan pemerintah berkaitan erat dengan akuntabilitas dan transparansi. Dengan adanya akuntabilitas pemerintah memberikan kesempatan bagi publik untuk ikut terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan. Akuntabilitas menjadi tolak ukur kinerja dalam sebuah organisasi termasuk organisasi sektor publik untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik dan tepat sasaran. Sedangkan dengan adanya transparansi, masyarakat dapat menjadi lebih cermat dalam menyikapi kejadian-kejadian yang ada di sekitarnya. Selain itu, dengan transparansi masyarakat berperan sebagai alat pengendalian atas kinerja yang dilakukan pemerintah.

Meskipun sistem anggaran sudah mengalami perubahan yang sangat baik dengan diterapkannya sistem anggaran berbasis kinerja, namun dalam

penerapannya bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan. Anggaran yang ditargetkan tidak ada yang terealisasi sesuai dengan yang dianggarkan. Seperti yang terlihat pada data Realisasi Anggaran Pendapatan Pemerintah Kota Medan Tahun 2015-2019, yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan berikut ini:

Tabel 1.1 Realisasi Anggaran Pendapatan Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2015-2019

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2015	Rp.5.046.111.839.162,45	Rp.4.183.906.157.155,42	82,91
2016	Rp.5.490.162.683.364,97	Rp.4.308.066.881.066,01	78,47
2017	Rp.5.523.623.117.419,81	Rp.4.409.065.482.200,50	79,82
2018	Rp.5.239.408.011.116,00	Rp.4.253.618.758.532,53	81,19
2019	Rp.6.257.239.035.331,00	Rp. 5.518.768.106.206,31	88,20

Sumber: BPKAD Kota Medan (2021)

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa realisasi anggaran Pendapatan Pemerintah Kota Medan pada tahun 2015-2019 belum berjalan optimal dan masih belum terealisasi 100%. Seperti pada tahun 2015 realisasi pendapatan sebesar 82,91%, kemudian tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 78,47%. Tahun 2017 mengalami sedikit kenaikan, realisasi pendapatan menjadi 79,82%. Pada tahun 2018 realisasi pendapatan mengalami kenaikan menjadi 81,19%. Dan pada tahun 2019 realisasi pendapatan mengalami peningkatan yang cukup besar menjadi 88,20%.

Realisasi anggaran yang tidak pernah sesuai dengan yang direncanakan diawal dan realisasi yang selalu berfluktuasi pada setiap periode anggaran, tersebut semakin menegaskan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan belum terlaksana dengan maksimal. Selisih antara anggaran dengan realisasi menunjukkan bahwa belum adanya efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran tersebut.

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja, Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan”**.

1.2 Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalah yang didapat adalah:

1. Menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik dan transparansi publik oleh organisasi sektor publik seperti unit-unit kerja pemerintahan baik pusat maupun daerah.
2. Realisasi anggaran pemerintah kota medan selalu lebih rendah dibandingkan target anggaran yang telah di rencanakan, mengindikasikan kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan belum bekerja secara maksimal.

1.2.2 Batasan Masalah Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dan keluar dari pembahasan maka peneliti membatasi masalah penelitian hanya dalam anggaran berbasis kinerja, akuntabilitas, transparansi dan kinerja keuangan yang di lihat dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Medan tahun anggaran 2015-2019.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya maka peneliti mengemukakan beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini diantaranya:

1. Apakah anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan?
2. Apakah akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan?
3. Apakah transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan?
4. Apakah anggaran berbasis kinerja, akuntabilitas dan transparansi secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas maka dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan.
2. Untuk mengetahui apakah akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan.
3. Untuk mengetahui apakah transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan Kota Medan.

4. Untuk mengetahui apakah anggaran berbasis kinerja, akuntabilitas dan transparansi secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini peneliti berharap nantinya akan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak, diantaranya:

1. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap akan mendapatkan ilmu, informasi dan pemahaman mengenai anggaran berbasis kinerja, akuntabilitas, transparansi dan kinerja keuangan.

2. Bagi Pemerintah Kota Medan

Penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi tambahan bagi pihak yang membutuhkan dan dapat dijadikan dasar dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi Pemerintah Kota Medan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini nantinya dapat menjadi sumber informasi bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian terkait anggaran berbasis kinerja, akuntabilitas, transparansi dan kinerja keuangan dan lebih mengembangkan penelitian dengan menambahkan variabel diluar variabel penelitian.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Raka Sahri (2015) yang berjudul, “Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Cimahi. Sedangkan penelitian ini berjudul “Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja, Akuntabilitas dan Transaparansi Terhadap

Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan”.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada:

1. **Variabel Penelitian:** peneliti sebelumnya menggunakan 1 (satu) variabel dependen (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dan 1 (satu) variabel independen (Anggaran Berbasis Kinerja). Sedangkan penelitian ini menggunakan 1 (satu) variabel dependen (Kinerja Keuangan Pemerintah) dan 3 (tiga) variabel independen (Anggaran Berbasis Kinerja, Akuntabilitas dan Transparansi).
2. **Waktu Penelitian:** Penelitian terdahulu dilakukan tahun pada tahun 2018 sedangkan penelitian ini dilakukan tahun 2021.
3. **Lokasi Penelitian:** Lokasi penelitian terdahulu Penelitian Pada Instansi Pemerintah Kota Cimahi, sedangkan penelitian ini dilakukan di Pemerintah Kota Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi Dalam Pemerintahan

Teory Agency adalah hubungan antara dua pihak dimana pihak terdapat pihak satu yang disebut sebagai agen yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan tindakan untuk dan atas nama serta dibawah pengawasan pihak lain yaitu prinsipal. Prinsipal adalah pihak yang memberikan kewenangan pada agen untuk melakukan perbuatan tertentu serta memonitor tindakan agen (Budi, 2015).

Dalam prakteknya pelaporan pelaksanaan anggaran pada organisasi sektor publik merupakan suatu konsep yang didasari teori keagenan. Pemerintah dalam hal ini sebagai agen harus menunjukkan akuntabilitasnya dengan melaksanakan kewajibannya untuk menyajikan laporan pelaksanaan anggaran yang bermanfaat sebagai pertanggungjawaban kepada para pengguna informasi keuangan pemerintah secara transparan. Sebagai prinsipal dalam mengevaluasi kinerja keuangan dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik, prinsipal harus memantau kinerja agen, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dengan efisien serta tercapainya akuntabilitas publik.

Peraturan perundang-undangan pada pemerintahan secara tersirat merupakan bentuk kontrak antara eksekutif, legislatif, dan publik. Kegiatan pemerintah akan diawasi oleh masyarakat dengan tujuan menyeleraskan tujuan yang akan dicapai bersama. Dalam melakukan tindakan pengawasan, masyarakat menuntut pemerintah untuk memberikan pertanggungjawaban melalui pelaporan keuangan. Tuntutan masyarakat dalam memberikan hasil kinerja kepada publik

memotivasi pemerintah melakukan banyak kegiatan untuk memenuhi tuntutan tersebut. Penyusunan anggaran menjadi prioritas utama pemerintah dalam memaksimalkan kinerjanya.

Pengelolaan keuangan daerah sepenuhnya dikelola oleh pemerintah daerah. Akuntabilitaas menuntut pemerintah untuk meningkatkan kinerja keuangannya. Dengan prinsip transparansi, evaluasi kinerja keuangan daerah dapat lebih mudah digunakan prinsipal untuk mengawasi pelaksanaan anggaran oleh agen atau pemerintah daerah.

Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat diketahui tingkat pencapaiannya dari rasio keuangan. DPR sebagai wakil rakyat mengawasi kinerja keuangan agar segala kebijakan pemerintah khususnya dalam penggunaan anggaran serta realisasinya dapat mengutamakan kepentingan publik.

2.1.2 Anggaran

a. Pengertian Anggaran

Anggaran merupakan rencana keuangan yang dapat membantu pimpinan organisasi dalam merencanakan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam oraganisasi tersebut. Anggaran dapat menjadi tolak ukur untuk menunjukkan kemampuan sumber daya dalam memperoleh hasil yang diharapkan selama periode waktu tertentu.

Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara berurut dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam satuan moniter yang mencakup seluruh kegiatan perusahaan dalam jangka waktu tertentu untuk periode yang akan datang. Anggaran disebut juga dengan rencana keuangan karena rencana yang disusun dinyatakan dalam bentuk satuan moniter. Pada anggaran, pencapaian efisiensi dan

efektivitas dari kegiatan yang dilakukan dapat diukur dengan menkualifikasikan segala jenis kegiatan dengan satuan uang. Proses pelaksanaan kegiatan dapat terkendali dengan menggunakan anggaran sebagai alat perbandingan dalam mengukur hasil pelaksanaan kegiatan serta menggunakan anggaran untuk mengarahkan suatu kegiatan. Para ahli mengungkapkan pengertian anggaran antara lain sebagai berikut:

Garrison, dkk. (2013), mengungkapkan Anggaran adalah rencana rinci tentang perolehan dan penggunaan sumber daya keuangan dan sumber daya lainnya selama suatu periode waktu tertentu.

Sasongko dan Parulian (2015), menyatakan Anggaran merupakan rencana kegiatan yang akan dijalankan oleh organisasi dalam satu periode yang tertatat secara kuantitatif. Informasi yang terdapat diperoleh dari anggaran di antaranya jumlah produk dan harga jualnya untuk tahun depan.

Halim dan Kusufi (2017), anggaran merupakan dokumen yang berisi tentang perkiraan kerja, berupa penerimaan dan pengeluaran yang disajikan dalam ukuran moneter yang ingin dicapai pada periode waktu tertentu dan menyertakan data masa lalu sebagai bentuk pengendalian dan penilaian kinerja.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa anggaran adalah rencana kerja atau pengendalian keuangan tentang apa yang akan dilakukan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu yang dinyatakan dalam satuan uang.

a. Fungsi Anggaran

Secara umum Anggaran berfungsi sebagai berikut:

1. Sebagai alat perencanaan

Anggaran merupakan suatu alat perencanaan untuk mencapai tujuan tertentu. Anggaran dalam sektor publik diperlukan dalam merencanakan setiap tindakan yang akan dilakukan pemerintah, menentukan besarnya biaya yang dibutuhkan dan hasil yang akan dicapai dari kegiatan pemerintah tersebut.

2. Sebagai alat pengendalian

Anggaran merupakan suatu alat yang penting untuk menghubungkan antara proses perencanaan dan proses pengendalian. Anggaran menyajikan rencana menyeluruh atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah sebagai alat pengendalian, agar pembelanjaan yang dilakukan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Para eksekutif juga dapat dikendalikan (membatasi kekuasaan) dengan adanya anggaran sektor publik tersebut.

3. Sebagai alat kebijakan fiskal

Dengan adanya anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah, sehingga dapat digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menstabilkan ekonomi, memfalitasai serta mengkordinir seluruh kegiatan ekonomi masyarakat. Dengan anggaran publik ini maka dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah sehingga dapat dilakukan pertimbangan-pertimbangan dan perkiraan ekonomi.

4. Anggaran sebagai alat politik

Dalam organisasi sektor publik, anggaran merupakan *political tool* yaitu dapat dilihat komitmen komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif dalam

melaksanakan kegiatan yang telah dijanjikan.

5. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi

Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar setiap unit kerja pemerintahan. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya konflik dalam suatu organisasi dalam mencapai tujuan organisasi tersebut.

6. Anggaran adalah alat penilaian kinerja

Kinerja pembuat anggaran akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan dihubungkan dengan pelaksanaan anggaran yang sudah dicapai. Anggaran merupakan sarana yang efektif untuk pengukur, pengendalian dan penilaian kerja

7. Anggaran sebagai alat motivasi

Anggaran sebagai instrumen dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi masyarakat agar bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

8. Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik

Kalangan masyarakat dapat menyampaikan suaranya dan mempercayakan aspirasinya proses penganggaran publik yang ada.

Menurut Munandar (2015), ada tiga Fungsi Anggaran yaitu:

1. Sebagai alat pedoman kerja

Anggaran berfungsi sebagai rencana kerja, yang disusun berdasarkan pengalaman masa lalu dan perkiraan atas masa depan.

2. Sebagai alat koordinasi

Anggaran dalam fungsinya sebagai alat koordinasi yaitu sebagai suatu upaya

untuk mendapatkan keselarasan dalam tindakan, sehingga tercipta pula keseimbangan dengan tujuan.

3. Sebagai alat pengawasan

Anggaran dalam fungsinya sebagai alat Pengawasan dengan dengan mengidentifikasi penyimpangan-penyimpangan dalam pencapaian hasil dan perencanaan aktivitas.

b. Tujuan Anggaran

Tujuan penyusunan anggaran dikemukakan oleh Sasongko dan Parulian (2015), yaitu:

1. Perencanaan

Anggaran adalah perencanaan yang menjadi petunjuk bagi penyusunan dan penetapan tujuan dalam organisasi.

2. Koordinasi

Anggaran bertujuan memudahkan koordinasi antar bagian di dalam organisasi.

3. Motivasi

Anggaran mendorong pengelola menetapkan target-target tertentu yang harus dicapai oleh perusahaan.

4. Pengendalian

Dengan pengendalian pengelola dapat mengoreksi dan mengendalikan setiap penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan organisasi agar tidak menghambat pencapaian tujuan organisasi.

c. Manfaat Anggaran

Manfaat anggaran menurut Nafarin (2015), antara lain:

1. Setiap kegiatan menjadi terfokus pada pencapaian tujuan bersama.
2. Digunakan sebagai alat menilai kinerja pegawai.
3. Memotivasi pegawai dalam bekerja.
4. Menimbulkan rasa tanggung jawab pada pegawai.
5. Menghemat biaya.
6. Memanfaatkan sumber daya seefisien mungkin.

d. Jenis-jenis Anggaran

Secara garis besar anggaran dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Anggaran Operasional Dan Anggaran Modal

Anggaran dibagi menjadi dua menurut jenis aktivitasnya, antara lain anggaran operasional dan anggaran modal. Anggaran operasional memuat rencana kebutuhan dalam menjalankan kegiatan sehari-hari dalam jangka waktu 1 tahun. Anggaran operasional disebut sebagai Pengeluaran pendapatan (*revenue expenditure*), yaitu jenis Pengeluaran yang bersifat rutin dan jumlahnya relatif kecil serta tidak menambah fungsi suatu aset.

Sedangkan anggaran modal (*capital budget*) menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap, seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot dan sebagainya. Belanja modal adalah Pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah jumlah aset atau kekayaan organisasi sektor publik, yang selanjutnya akan menambah anggaran operasional untuk biaya pemeliharannya.

2. Anggaran Berdasarkan Pengesahan

Anggaran berdasarkan status hukumnya juga dibagi menjadi dua yaitu anggaran *tentative* dan anggaran *enacted*. Anggaran tentatif merupakan anggaran yang kemunculannya dipicu oleh hal-hal yang tidak direncanakan sebelumnya dan tidak memerlukan pengesahan dari legislatif. Sedangkan anggaran *enacted* adalah anggaran yang terlebih dahulu direncanakan, kemudian dibahas dan disetujui oleh lembaga legislatif.

3. Anggaran Dana Umum dan Anggaran Dana Khusus

Berdasarkan pemerintahannya Dana Negara dibagi menjadi 2 (dua) yaitu dana umum dan dana khusus. Dana Umum digunakan untuk membiayai kegiatan sehari sehari dan tergolong umum dalam pemerintahan, sedangkan dana khusus digunakan untuk membiayai dan dialokasikan khusus untuk tujuan tertentu, misalnya *Debt Service Fund* yang digunakan khusus untuk pembayaran utang.

4. Anggaran Tetap dan Anggaran Fleksibel

Anggaran tetap merupakan anggaran belanja yang sudah ditetapkan di awal dan jumlahnya tidak boleh dilampaui meskipun ada penambahan jumlah kegiatan yang dilakukan Sedangkan anggaran fleksibel adalah anggaran yang dimana harga satuan barang atau jasa telah ditetapkan tetapi jumlah anggaran akan berfluktuasi tergantung dari banyaknya kegiatan yang dilakukan.

5. Anggaran Eksekutif dan Anggaran Legislatif

Anggaran juga dibagi 2 (dua) jika dilihat berdasarkan penyusunannya, yaitu anggaran eksekutif dan anggaran legislatif. Anggaran eksekutif adalah anggaran yang disusun oleh lembaga eksekutif yaitu pemerintah. Sedangkan anggaran legislatif adalah anggaran yang disusun oleh lembaga legislatif tanpa melibatkan pihak eksekutif. Selain itu, ada juga disebut anggaran bersama, yaitu

anggaran yang disusun secara bersama-sama antara lembaga legislative dan lembaga eksekutif. Sementara anggaran yang disusun oleh suatu komite khusus disebut anggaran komite.

e. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Halim dan Iqbal (2012), menjelaskan mengenai struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, meliputi:

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan daerah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak daerah. Pendapatan daerah meliputi:

- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Dana Perimbangan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

2. Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang dibebankan dalam periode tahun anggaran tertentu, meliputi:

- a. Belanja Langsung
- b. Belanja Tidak Langsung

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada periode anggaran tersebut maupun pada periode berikutnya. Pembiayaan ini dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

2.1.3 Anggaran Berbasis Kinerja

a. Pengertian Anggaran Berbasis Kinerja

Beberapa ahli memberikan pendapat tentang pengertian anggaran berbasis kinerja, antara lain:

Halim dan Iqbal (2012), menyatakan Anggaran berbasis kinerja merupakan penyusunan anggaran dengan menghubungkan pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut. Keluaran dan hasil tersebut diterapkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja.

Djayasinga (2015), menyatakan anggaran berbasis kinerja adalah suatu sistem penganggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan.

Mahmudi (2016), Anggaran berbasis kinerja merupakan sistem penganggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara anggaran (*input*) dengan keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut.

Mauro, dkk. (2019) menjelaskan bahwa anggaran berbasis kinerja adalah sistem penganggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara anggaran (*input*) dengan keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*).

Dari beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa anggaran berbasis kinerja adalah suatu sistem penyusunan anggaran yang mengutamakan hasil dari kinerja suatu kegiatan yang dilakukan oleh organisasi.

b. Prinsip Anggaran Berbasis Kinerja

Penyusunan anggaran berbasis kinerja harus memperhatikan prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja. Halim dan Iqbal (2012), menyatakan prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja antara lain:

1. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran

Anggaran harus dapat menerangkan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, hasil serta manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau program yang dianggarkan. Setiap masyarakat memiliki hak dan juga akses yang sama dengan pemerintah dalam mengetahui proses penganggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama terkait dengan pemenuhan kebutuhan hidup setiap masyarakat. Masyarakat juga mendapat hak yang sama untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana atau pelaksanaan anggaran tersebut.

2. Disiplin Anggaran

Pendapatan yang direncanakan adalah perkiraan yang terukur secara logis yang didapatkan untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan pada tiap pos anggaran adalah batas tertinggi pengeluaran belanja. Setiap pengeluaran pada pos anggaran harus sesuai dengan kegiatan yang dianggarkan.

3. Keadilan Anggaran

Pemerintah daerah wajib mengalokasikan penggunaan setiap anggaran secara adil agar dapat dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

4. Efisiensi dan efektifitas Anggaran

Penyusunan anggaran dilakukan berdasarkan azas efisiensi, pelaksanaannya tepat waktu, tepat guna, dan dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya.

Dana yang telah tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin agar menghasilkan peningkatan dan kesejahteraan yang maksimal untuk setiap pemangku kepentingan.

5. Disusun dengan Pendekatan Kinerja

Penyusunan anggaran dengan pendekatan kinerja berfokus pada pencapaian hasil kerja dari rencana alokasi biaya yang telah ditetapkan. Pencapaian hasil kerja harus selaras atau lebih besar dari biaya yang telah ditentukan sebelumnya.

c. Tujuan Anggaran Berbasis Kinerja

Penyusunan anggaran berbasis kinerja menurut Bahri (2012), bertujuan untuk:

1. Menunjukkan hubungan antara pendanaan dengan prestasi kerja yang ingin dicapai.
2. Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelaksanaan dan pengelolaan anggaran.
3. Meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit kerja dalam pelaksanaan dan pengelolaan anggaran.

d. Manfaat Anggaran Berbasis Kinerja

Djayasinga (2015), menyatakan manfaat anggaran berbasis kinerja adalah:

1. Dapat menjadi acuan bagi organisasi untuk mengambil langkah untuk tahun berikutnya.

2. Rencana kerja organisasi akan lebih pasti dan menjadi acuan bagi setiap karyawan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
3. Memotivasi pegawai dalam bekerja karena pengukuran penilaian kinerjanya melalui sistem ini.
4. Dasar atau acuan untuk promosi atau penundaan jabatan, penghargaan, hukuman atau lainnya lebih jelas.
5. Karyawan akan lebih efektif bekerja karena sudah mengetahui dengan jelas apa yang harus dikerjakannya untuk satu periode ke depan.
6. Dapat mendorong organisasi ke arah yang lebih baik.
7. Membantu masyarakat dalam mengevaluasi tingkat pelayanan yang diberikan pemerintah.
8. Sebagai alat komunikasi yang efektif antara pemerintah, DPRD dan masyarakat.

e. Elemen-Elemen Anggaran Berbasis Kinerja

Departemen Keuangan Republik Indonesia / Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (2008) dalam Reza dan Darwanis (2016), menjelaskan elemen-elemen utama anggaran berbasis kinerja adalah:

1. Visi dan Misi

Visi adalah sesuatu yang akan dicapai oleh pemerintah dalam waktu jangka panjang. Sedangkan misi merupakan cara-cara yang dilakukan untuk mencapai visi tersebut.

2. Tujuan

Tujuan adalah uraian dari visi dan misi. Tujuan digambarkan dalam RPJM nasional yang menunjukkan tahapan yang harus dilalui dalam rangka mencapai

visi dan misi yang telah ditetapkan. Tujuan menggambarkan arah yang jelas dan juga tantangan yang masuk akal.

3. Sasaran

Sasaran yang baik dinilai dengan beberapa kriteria, seperti spesifik, dapat dicapai, terukur, relevan dan ada batasan waktu.

4. Program

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Program terdiri atas beberapa kegiatan dan disertai dengan target sasaran *output* dan *outcome*.

5. Kegiatan

Kegiatan adalah rangkaian pelayanan yang untuk menghasilkan *output* dan *outcome* untuk mencapai suatu program.

f. Unsur-Unsur Pokok Anggaran Berbasis Kinerja

Unsur-unsur pokok anggaran berbasis kinerja menurut Departemen Keuangan Republik Indonesia / Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK, 2008) dalam Reza dan Darwanis (2016) adalah:

1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kerja adalah suatu proses yang rasional dan sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis serta menggunakan informasi untuk menentukan keefektifan dan keefisienan pelayanan yang dilaksanakan pemerintah untuk mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan. Konsekuensi anggaran berbasis kinerja menghubungkan perencanaan strategis dengan penganggaran.

a. Menentukan Program atau Kegiatan Secara Jelas

Dalam pencapaian tujuan strategis harus ditentukan program ataupun kegiatan

secara jelas. Struktur pembiayaan yang jelas akan muncul apabila menggunakan sistem akuntansi berbasis akrual.

b. Sistem Informasi Yang Memadai

Dalam rangka pengukuran kinerja yang baik maka diperlukan sistem informasi yang dapat menghasilkan informasi yang memadai dalam menilai pencapaian kinerja dari setiap unit kerja yang bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan.

Tingkat informasi dasar yang harus dikembangkan antara lain:

- a) Ekonomis
- b) Efisien
- c) Efektif

Informasi yang dihasilkan harus mencakup sejauh mana perbandingan antara kinerja yang direncanakan dengan kinerja yang ingin dicapai. Pengukuran kinerja dikontrol serta diverifikasi oleh instansi pusat maupun lembaga unit.

a) Pihak Eksternal

Peran dari pihak eksternal dalam pencapaian penilaian yang adil sangat diperlukan dalam mengukur kinerja yang lebih independen.

b) Mengukur Kinerja Yang Strategis

Sistem pengukuran kinerja sebaiknya hanya mengukur kinerja yang strategis bukan menekankan tingkat komprehensif dan birokratis.

2. Penghargaan dan Hukuman

Pelaksanaan penganggaran berdasarkan kinerja sulit dicapai dengan optimal tanpa ditunjang dengan faktor-faktor yang dapat menunjang pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja yaitu berupa ganjaran dan hukuman bagi para

pelaksana penganggaran. Penghargaan dan hukuman tersebut antara lain:

- a. Penerapan insentif atas kinerja yang dicapai dan hukuman atas kegagalannya
Penerapan sistem insentif di sektor publik perlu didukung oleh mekanisme bukan keuangan, terutama keinginan dan kebutuhan atas pencapaian kinerja. Hal ini dapat terjadi misalnya apabila ada aturan bahwa lembaga atau unit kerja yang mencapai kinerja dengan baik akan memperoleh prioritas atas anggaran berikutnya walaupun alokasi anggaran telah ditentukan oleh prioritas kebijakan dan program.
- b. Penerapan Efisiensi
Untuk meningkatkan kinerja melalui insentif atau disinsentif yaitu dengan penerapan efisiensi, yang dapat dilaksanakan dalam program dan kegiatan yang bersifat pelayanan publik. Alokasi anggaran untuk setiap program dan kegiatan dikurangi dengan jumlah tertentu untuk penerapan efisiensi dalam rangka meningkatkan efisiensi atas pelayanan yang diberikan.
- c. Penahanan atas penerimaan yang diperoleh oleh suatu lembaga
Selain itu dapat juga diterapkan penahanan atas penerimaan yang diperoleh oleh suatu lembaga, hal ini dapat dilaksanakan dengan suatu bentuk perjanjian antara lembaga pusat dengan lembaga.

3. Kontrak Kinerja

Kontrak atas kinerja dapat mulai diterapkan jika penganggaran berdasarkan kinerja telah dapat berkembang dengan baik. Atas nama pemerintah, Departemen Keuangan dapat melaksanakan kontrak atas pencapaian suatu kinerja dengan kementerian negara/lembaga teknis lainnya, begitu juga antara menteri dengan unit organisasi di bawahnya. Sistem kontrak kinerja harus

didukung oleh faktor-faktor berikut ini:

- a. definisi yang jelas terhadap pelayanan yang dikontrakkan
- b. kewenangan yang ada bagi pihak kementerian negara/lembaga untuk mengelola sumber daya yang ada.

4. Kontrol Eksternal dan Internal

Sistem kontrol eksternal terhadap penggunaan anggaran harus dilakukan oleh badan di luar pengguna anggaran. Pengguna anggaran harus mendapat persetujuan sebelum menggunakan anggaran mereka. Kontrol ditujukan pada kontrol *input* suatu kegiatan, serta langkah pencapaian *output*. Untuk menciptakan kontrol yang efektif harus memenuhi persyaratan:

- a. adanya pemisahan antara lembaga kontrol dan lembaga pengguna anggaran
- b. kontrol dilakukan pada *input*, *output* dan *outcome*
- c. kontrol dilakukan sebelum dan sesudah anggaran digunakan.

5. Pertanggungjawaban Manajemen

Dalam sistem ini manajer pengguna anggaran memperoleh kewenangan penuh dalam merencanakan dan mengelola anggaran mereka. Prinsip dasar di dalam sistem ini adalah manajer pengguna anggaran harus diberi kebebasan penuh bila akuntabilitas atas pencapaian *output* yang ingin dicapai. Akuntabilitas dapat diwujudkan, dengan mendesain sistem dengan karakteristik dasar, yaitu:

- a. Kontrol dilakukan pada *output* dan *outcome*

Kontrol ini akan menyebabkan manajer bertanggung jawab terhadap *output* baik volume, waktu pengerjaan maupun kualitasnya serta *outcome* yang timbul.

b. Adanya kebebasan bagi manajer

Manajer dapat melakukan dan menerapkan profesionalitas mereka dengan optimal dengan adanya kebebasan bagi manajer.

2.1.4 Akuntabilitas

a. Pengertian Akuntabilitas

Beberapa ahli memberikan pendapat tentang pengertian akuntabilitas antara lain:

Kusumastuti, (2014) menjelaskan bahwa akuntabilitas adalah suatu kewajiban penyedia penyelenggara kegiatan publik untuk menjelaskan dan menjawab segala hal yang menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil kinerjanya.

Setiana dan Yuliani, (2017) juga memberikan pendapat bahwa akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah/agent/pemerintah untuk bertanggungjawab, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk pertanggungjawaban tersebut.

Khusaini, (2018) menjelaskan bahwa akuntabilitas merupakan inti dari proses anggaran. Akuntabilitas membuat petugas yang mendapat tugas melaksanakan dan mempertanggungjawabkan anggaran harus dapat mengungkapkan tentang penggunaan dana masyarakat.

b. Prinsip-prinsip Akuntabilitas

Menurut Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam Yunita dan Chirtianingrum, (2018) menjelaskan tentang prinsip-prinsip akuntabilitas yaitu:

- a. Transparansi yaitu kemampuan organisasi mengungkapkan fakta mengenai kinerjanya.
- b. Kewajiban yaitu suatu cara organisasi menangani konsekuensi dari kinerjanya.
- c. Dapat dikendalikan yaitu berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah diberikan.
- d. Tanggung jawab yaitu tanggung jawab atas standar kinerja yang ada.
- e. Tanggapan yaitu pemenuhan harapan nyata pemangku kepentingan yang harus dipenuhi organisasi.

Bastian (2016) juga memberikan pendapat mengenai prinsip-prinsip transparansi yaitu:

- a. Transparansi yaitu keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran daerah. Transparansi juga memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat terutama pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat.
- b. Akuntabilitas berarti dari perencanaan, pelaporan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat.
- c. *Value for money* yaitu dengan menetapkan tiga prinsip dalam proses penganggaran yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas.

c. Indikator Akuntabilitas

Menurut Ellwood (1993) dalam Putra (2013) ada 4 (empat) dimensi akuntabilitas publik yang harus dipenuhi organisasi sektor publik, yaitu:

- a. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum.

Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan

(*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum (*legal accountability*) terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

b. Akuntabilitas Proses

Akuntabilitas proses terkait dengan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas apakah sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.

c. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan tujuan yang ditetapkan apakah dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

d. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

2.1.5 Transparansi

a. Pengertian Transparansi

Tahir (2011) memberikan pendapat tentang pengertian transparansi adalah bentuk keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan dan merupakan salah satu syarat penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Adanya transparansi di setiap kebijakan tata kelola pemerintahan, maka keadilan (*fairness*) dapat ditumbuhkan.

Poae dan Saerang (2013) menjelaskan pengertian transparansi adalah suatu kebebasan mengakses aktivitas politik dan ekonomi pemerintah.

b. Prinsip-prinsip Transparansi

Prinsip-prinsip transparansi dikemukakan oleh Humanitarian Forum Indonesia (HFI) dalam (Gunawan, 2016) yaitu:

1. Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses (dana, cara pelaksanaan, bentuk bantuan atau program).
2. Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan.
3. Adanya laporan berkala tentang pendayagunaan sumberdaya dalam perkembangan proyek yang dapat dimanfaatkan dan diakses oleh publik.
4. Laporan tahunan.
5. Website atau media publikasi organisasi.
6. Pedoman dalam penyebaran informasi.

c. Indikator Transparansi

Indikator-indikator Transparansi diungkapkan oleh Mahmudi, (2015) antara lain:

a. Informatif

Penyediaan informasi yang jelas, akurat, tepat waktu, mudah diakses dan dapat dibandingkan.

b. Keterbukaan

Setiap informasi publik harus bersifat terbuka dan mudah diakses.

c. Pengungkapan

Pengungkapan diwajibkan agar laporan keuangan yang disusun dan disajikan menjadi gambaran keadaan kejadian ekonomi yang terjadi di pemerintahan.

Pengungkapan merupakan bagian dari prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan. Pengungkapan.

2.1.6 Keuangan Daerah

a. Pengertian Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 tahun 2011, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan pengertian Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Kuswandi (2016) menyatakan Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 pasal 1 ayat 5 menjelaskan Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menerangkan bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.

b. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut (Devas, 2007) dalam (Ayu, 2017) menyatakan pengelolaan keuangan daerah berarti mengurus dan mengatur keuangan daerah itu sendiri dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang terdiri atas:

1. Tanggung jawab

Setiap organisasi harus mempertanggungjawabkan keuangannya kepada lembaga atau orang dan masyarakat umum.

2. Mampu memenuhi kewajiban keuangan

Pengelolaan keuangan harus ditata dan dikelola sedemikian rupa sehingga mampu melunasi semua ikatan keuangan jangka pendek, jangka panjang, ataupun pinjaman jangka panjang.

3. Kejujuran

Pengelolaan keuangan pada prinsipnya harus diserahkan kepada pegawai yang benar-benar jujur serta dapat dipercaya.

4. Hasil guna dan daya guna

Tata cara mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah daerah dengan biaya yang paling rendah dan dalam waktu yang secepat-cepatnya.

5. Pengendalian

Petugas pengelola keuangan daerah, DPRD dan petugas pengawasan harus melakukan pengendalian agar semua tujuan tersebut dapat tercapai.

c. Undang-Undang Pelaksanaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah sudah mengalami berbagai perubahan. Perubahan tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan transparan dengan melakukan tata kelola yang baik secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan pergantian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan dinamika dalam perkembangan Pemerintahan Daerah dalam rangka menjawab permasalahan yang terjadi pada Pemerintahan Daerah. Perubahan kebijakan Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan dampak yang cukup besar bagi berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah, termasuk pengaturan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah juga mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dalam melaksanakan ketentuan Pasal 293 dan Pasal 330 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah

menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada tanggal 12 Maret 2019, sekaligus mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang sebelumnya dijadikan landasan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

2.1.7 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

a. Pengertian Kinerja Keuangan

Hery (2015), mengemukakan bahwa kinerja keuangan adalah suatu usaha resmi untuk menilai efisiensi dan efektivitas organisasi dalam menghasilkan laba dan posisi kas tertentu. Suatu organisasi dapat dikatakan berhasil apabila telah mencapai suatu kinerja tertentu yang telah ditetapkan.

Isna dan Ayu (2015), juga menyatakan kinerja keuangan adalah suatu tema yang sangat penting dibahas dalam organisasi sektor publik termasuk pemerintahan, sejak diterapkannya anggaran berbasis kinerja, pemerintah dituntut agar menghasilkan kinerja keuangan dengan baik agar dapat memperhatikan efektivitas, efisiensi dan ekonomis.

Fahmi (2018), juga berpendapat pengertian kinerja keuangan merupakan suatu analisis yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana suatu organisasi sudah melaksanakan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam penggunaan keuangan dengan baik dan benar.

b. Kinerja Keuangan Berdasarkan LAKIP

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menjelaskan kewajiban setiap instansi pemerintah untuk menyusun dan melaporkan penggambaran strategi tentang program atau kegiatan

pokok yang akan dicapai 1-5 tahun, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi setiap instansi dan jajarannya. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan fungsi instansi tersebut tidak ada menyinggung mengenai peran laporan keuangan instansi yang seharusnya menjadi dasar penyusunan LAKIP, sementara semua program yang diselenggarakan pemerintah berfokus pada keuangan atau pendanaan.

Instansi pemerintah yang berkewajiban untuk menerapkan akuntabilitas kinerja dan menyampaikan pelaporannya adalah instansi dari pusat, pemerintah daerah atau kota. Sedangkan yang bertanggung jawab dalam penyusunan LAKIP adalah pejabat yang melayani fungsi administrasi di instansi tersebut. Sementara pimpinan bersama tim bertanggung jawab untuk mempertahankan. Penyusunan LAKIP juga harus mengikuti prinsip-prinsip yang wajar yaitu laporan harus disusun secara objektif dan transparan. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:

1. Prinsip Pertanggungjawaban

Dengan adanya prinsip pertanggungjawaban sehingga membuat lingkupannya jelas. Hal-hal yang dikendalikan oleh pihak yang melaporkan harus dapat dipahami pembaca laporan.

2. Prinsip pengecualian

Dalam prinsip ini yang dilaporkan adalah setiap hal yang penting dan berarti bagi pengambil keputusan dan pertanggungjawaban instansi yang bersangkutan.

3. Prinsip manfaat

Dalam prinsip ini manfaat laporan harus lebih besar dari pada biaya penyusunan.

LAKIP berisi penjelasan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi setiap instansi dalam rangka pencapaian visi dan misi serta penjabarannya. Selain itu diperlukan beberapa aspek pendukung dalam penjelasan pertanggungjawaban tersebut, yaitu:

1. Aspek keuangan
2. Aspek sumber daya
3. Aspek sarana dan prasarana
4. Metode kerja, pengendalian manajemen, dan kebijaksanaan lain yang mendukung pelaksanaan tugas instansi.

Dalam menyempurnakan LAKIP sebagai umpan balik bagi setiap pihak yang berkepentingan, maka bentuk serta isinya disamakan tanpa mempedulikan karakteristik setiap instansi pemerintah. Penyeragaman ini bertujuan untuk menyamakan penyajian informasi yang dimuat dalam LAKIP. Penyeragaman juga bermaksud untuk pelaporan yang bersifat rutin, sehingga evaluasi atau perbandingan dapat dilakukan dengan layak.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut adalah beberapa referensi penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama/ Tahun	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Annisa Alamri (2014)	Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara	Variabel Independen: 1. Anggaran Berbasis Kinerja Variabel Dependen: 1. Kinerja Keuangan	Hasil penelitian dan pengujian hipotesis membuktikan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif dan signifikan pada kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara.

2.	Hasri Raka Sahri (2015)	Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru	<p>Variabel Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anggaran Berbasis Kinerja 2. Pengendalian Intern <p>Variabel Dependen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kinerja Keuangan 	<p>1. Hasil pengujian hipotesis pertama membuktikan bahwa variabel anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru. Pegawai terpacu dengan reward dan pemberian penghargaan, sehingga pegawai termotivasi untuk ikut serta dalam penerapan anggaran berbasis kinerja tersebut.</p> <p>2. Hasil pengujian hipotesis kedua membuktikan bahwa pengendalian intern berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru. Dengan adanya unsur pengendalian akan menjaga sistem informasi dari kesalahan yang mungkin terjadi serta dapat menunjang untuk menghasilkan kinerja yang baik.</p>
3.	Dendy Syaiful Akbar (2016)	Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah	<p>Variabel Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anggaran Berbasis Kinerja <p>Variabel Dependen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kinerja Keuangan 	<p>Hasil penelitian ini memberikan simpulan dari pengaruh yang diberikan oleh variabel independen Anggaran Berbasis Kinerja terhadap variabel dependen Kinerja Keuangan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anggaran Berbasis Kinerja pada Balai Pengelolaan Jalan (BPJ) Wilayah Pelayanan V telah diterapkan secara efektif dan efisien. 2. Kinerja Keuangan Balai Pengelolaan Jalan (BPJ) Wilayah Pelayanan V telah efektif, ekonomis dan efisien dalam penerapannya. 3. Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Balai Pengelolaan Jalan (BPJ) Wilayah Pelayanan V.

4.	Ana Muchlisa Rezeqiah (2017)	Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Variabel Independen: 1. Anggaran Berbasis Kinerja Variabel Dependen 1. Akuntabilitas Kinerja	Hasil penelitian dan pengujian hipotesis membuktikan bahwa anggaran berbasis kinerja secara signifikan mempengaruhi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan.
5.	Dewi Selviani (2018)	Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Cimahi.	Variabel Independen: 1. Anggaran Berbasis Kinerja Variabel Dependen 1. Akuntabilitas Kinerja	1. Hasil pengujian menunjukkan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja pada bagian BPKAD Pemerintah Kota Cimahi sudah diterapkan sesuai dengan indikator. 2. Hasil pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja pada bagian BPKAD Pemerintah Kota Cimahi sudah diterapkan sesuai dengan indikator. 3. Hasil pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja.

Sumber: Diolah Peneliti (2021)

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual menggambarkan hubungan variabel-variabel penelitian secara teoritis, yaitu variabel independen dengan variabel dependen. Kerangka konseptual merupakan abstraksi dari suatu fenomena sehingga dapat digabungkan dan membentuk teori yang menjelaskan hubungan antara variabel yang diteliti.

Halim dan Iqbal (2012) berpendapat bahwa Anggaran berbasis kinerja adalah penyusunan anggaran dengan menghubungkan pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran

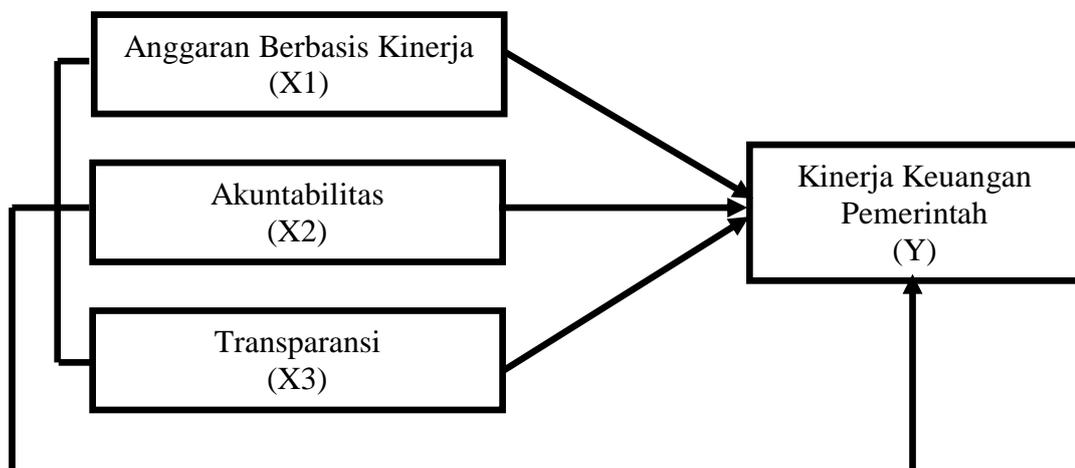
tersebut.

Setiana dan Yuliani, (2017) juga memberikan pendapat bahwa akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah/agent/pemerintah untuk bertanggungjawab, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk pertanggungjawaban tersebut.

Tahir (2011) memberikan pendapat tentang pengertian transparansi adalah bentuk keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan dan merupakan salah satu syarat penting untuk menciptakan *Good Governance*. Adanya transparansi di setiap kebijakan tata kelola pemerintahan, maka keadilan (*fairness*) dapat ditumbuhkan.

Hery (2015), mengemukakan bahwa kinerja keuangan adalah suatu usaha resmi untuk menilai efisiensi dan efektivitas organisasi dalam menghasilkan laba dan posisi kas tertentu. Berikut adalah gambaran kerangka konseptual dalam penelitian ini:

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



Sumber: Diolah Peneliti (2021)

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2018). Dikatakan sementara, karena jawaban masih didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta tinjauan yang diperoleh melalui pengumpulan data. Berdasarkan kerangka konseptual diatas, maka peneliti mengemukakan hipotesis pada penelitian ini yaitu:

1. Anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan.
2. Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan.
3. Transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan.
4. Anggaran berbasis kinerja, akuntabilitas dan transparansi secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Berdasarkan pendekatan penelitian maka penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif bersifat asosiatif. Kasmir (2012) menyatakan bahwa, penelitian kuantitatif/asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui derajat hubungan dan pola/bentuk pengaruh antar dua variabel atau lebih, dimana dengan penelitian ini maka akan meningkatkan teori yang berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala.

Penelitian ini membahas pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dimana anggaran berbasis kinerja, akuntabilitas dan transparansi sebagai variabel bebas sedangkan kinerja keuangan pemerintah sebagai variabel terikat.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Peneliti melakukan penelitian pada Pemerintah Kota Medan yang beralamat di Jalan Kapten Maulana Lubis, Medan.

3.2.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai dari April 2021 sampai dengan selesai. Seperti yang terlihat pada tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Tahun									
		Apr	Mei	Des	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
		2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021
1	Pengajuan Judul										
2	Penyusunan Proposal										
3	Seminar Proposal										
4	Perbaikan/Acc Proposal										
5	Pengolahan Data										
6	Penyusunan Skripsi										
7	Bimbingan Skripsi										
8	Sidang Meja Hijau										

Sumber: Diolah Peneliti (2021)

3.3 Populasi dan Sampel / Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Populasi

Sugiyono (2012) menyatakan bahwa, populasi adalah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun populasi objek dalam penelitian ini mencakup 30 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Medan. Sehingga populasi dalam penelitian ini mencakup 60 responden.

3.3.2 Sampel

Sampel pada penelitian ini adalah pegawai tetap/Aparatur Sipil Negara (ASN) bagian keuangan yang bekerja di SKPD Kota Medan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* adalah teknik pemilihan sampel dimana tidak dilakukan generalisasi terhadap sampel yang diambil. Teknik *purposive sampling* lebih digunakan pada penelitian-penelitian yang lebih mengutamakan tujuan penelitian dari pada sifat populasi dalam menentukan sampel penelitian. Metode *purposive sampling* dengan kriteria yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN) bagian keuangan

yang berkerja di SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Kota Medan.

Kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini ditetapkan sebagai berikut:

- a. Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Medan.
- b. Memiliki Masa Kerja sekurang-kurangnya 1 tahun pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang bersangkutan.
- c. Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja pada bagian keuangan dan/atau pelaporan keuangan serta laporan pertanggung jawaban.

SKPD yang dijadikan sampel penelitian adalah SKPD yang berbentuk Dinas, Badan dan Kantor yang ada dikota Medan, seperti yang terlihat di Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2 Sampel Penelitian

No	Nama SKPD	Kriteria			Responden
		A	b	c	
1	Inspektorat Kota Medan	✓	✓	✓	2
2	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	✓	✓	✓	2
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	✓	✓	✓	2
4	Badan Penelitian dan Pengembangan	✓	✓	✓	2
5	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	✓	✓	✓	2
6	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	✓	✓	✓	2
7	Dinas Kesehatan	✓	✓	✓	2
8	Dinas Pendidikan	✓	✓	✓	2
9	Dinas Pertanian dan Perikanan	✓	✓	✓	2
10	Dinas Perhubungan	✓	✓	✓	2
11	Dinas Ketenagakerjaan	✓	✓	✓	2
12	Dinas Pencegah Pemadam Kebakaran	✓	✓	✓	2
13	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	✓	✓	✓	2
14	Dinas Sosial	✓	✓	✓	2
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	✓	✓	✓	2
16	Dinas Pemuda dan Olahraga	✓	✓	✓	2
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	✓	✓	✓	2
18	Dinas Pekerjaan Umum	✓	✓	✓	2
19	Dinas UMKM	✓	✓	✓	2
20	Dinas Pariwisata	✓	✓	✓	2
21	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Penataan Ruang	✓	✓	✓	2
22	Dinas Perdagangan	✓	✓	✓	2

23	Dinas Industri	✓	✓	✓	2
24	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat	✓	✓	✓	2
25	Dinas Kebudayaan	✓	✓	✓	2
26	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	✓	✓	✓	2
27	Dinas Ketahanan Pangan	✓	✓	✓	2
28	Dinas Permukiman Kota Medan	✓	✓	✓	2
29	Sekretariat DPRD	✓	✓	✓	2
30	Satpol PP	✓	✓	✓	2
Jumlah					60

Sumber: www.pemkotmedan.co.id (2021)

3.3.3 Jenis dan Sumber Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Jenis Data

Jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Kuantitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan antara dua variabel atau lebih. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Pemerintah Kota Medan.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui *survey* yaitu dengan cara mengirimkan kusioner kepada kantor SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang berada di Kota Medan secara langsung.

Data sekunder diperoleh melalui laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Pemerintah Kota Medan yaitu data yang diperoleh berupa data dokumentasi yang dipublikasikan di website resmi Pemerintah Kota Medan, buku, jurnal, skripsi, tesis, dan perangkat lain yang berkaitan dengan judul penelitian.

3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Ghozali (2012) menyatakan, operasionalisasi variabel adalah suatu pemecahan variabel yang terkandung menjadi bagian yang terkecil sehingga dapat diketahui klasifikasi ukurannya. Operasional variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Kinerja Keuangan Pemerintah (Y), Anggaran Berbasis Kinerja (X1), Akuntabilitas (X2) dan Transparansi (X3).

3.4.1 Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas yang sifatnya tidak berdiri sendiri serta menjadi perhatian utama peneliti. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah Kinerja Keuangan Pemerintah (Y).

3.4.2 Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Variabel bebas yaitu variabel yang dapat mempengaruhi variabel terikat, baik itu secara positif atau negatif, serta sifatnya dapat berdiri sendiri. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah Anggaran Berbasis Kinerja (X1), Akuntabilitas (X2) dan Transparansi (X3). Berikut adalah penjelasan definisi operasional variabel sebagai berikut:

Tabel 3.3 Definisi Operasional Variabel

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala
Anggaran Berbasis Kinerja (X1)	Sistem anggaran yang memfokuskan pada pencapaian hasil kinerja atau keluaran dari anggaran yang telah ditetapkan. Dengan begitu, penyusunan dan pengalokasian anggaran dapat disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan kepentingan daerah yang bersangkutan (Undang-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realisasi Anggaran Pendapatan 2. Belanja Daerah 	Interval

	Undang Nomor 17 Tahun 2003).		
Akuntabilitas (X2)	Akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah/agent/pemerintah untuk bertanggungjawab, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk pertanggungjawaban tersebut (Setiana dan Yuliani, 2017)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum. 2. Akuntabilitas Proses. 3. Akuntabilitas Program. 4. Akuntabilitas Kebijakan. 	Interval
Transparansi (X3)	Transparansi adalah pemberian informasi keuangan yang terbuka dan jujur pada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (Setiana dan Yuliani, 2017)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informatif 2. Keterbukaan 3. Pengungkapan 	Interval
Kinerja Keuangan Pemerintah (Y)	Kinerja keuangan adalah kesanggupan pemerintah dalam mengelola keuangan yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam membiayai kebutuhan pemerintah, pembangunan serta pelayanan sosial (Halim, 2012).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masukan (<i>Input</i>) <i>Input</i> adalah Sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output yang telah direncanakan dan ditentukan diawal. 2. Keluaran (<i>Output</i>) <i>Output</i> adalah sesuatu yang terjadi akibat dari proses penggunaan masukan yang telah ditentukan diawal. Indikator dapat dijadikan prinsip untuk menilai peningkatan suatu kegiatan atau tolak ukur dihubungkan dengan target yang telah ditetapkan dengan baik dan terukur. 3. Hasil (<i>Outcome</i>) <i>Outcome</i> adalah suatu keluaran yang merupakan hasil nyata dari suatu keluaran. Indikator yang digunakan seperti target suatu kegiatan yang sudah ditetapkan. 4. Manfaat (<i>Benefit</i>) 	Interval

		<p><i>Benefit</i> adalah nilai tambah dari hasil yang manfaatnya akan terlihat dikemudian hari. Indikator yang digunakan seperti manfaat menunjukkan hal-hal yang diterapkan akan dicapai bila keluaran dapat diselesaikan dan berfungsi dengan maksimum.</p> <p>5. Dampak (<i>Impact</i>) <i>Impact</i> merupakan akibat atau pengaruh yang ditimbulkan oleh <i>benefit</i> dari suatu kegiatan. Indikator yang digunakan seperti kumpulan dari <i>benefit</i> yang terjadi, dampaknya akan terlihat setelah beberapa waktu kemudian.</p>	
--	--	---	--

Sumber: Diolah Peneliti (2021)

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua cara, yaitu penelitian pustaka dan penelitian lapangan. Berikut penjelasannya:

1. Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Peneliti memperoleh informasi yang berkaitan dengan topik yang sedang diteliti melalui buku, jurnal, skripsi, tesis, website resmi, dan perangkat lain yang berkaitan dengan judul penelitian.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Data utama penelitian diperoleh melalui penelitian lapangan, penelitian memperoleh data langsung dari pihak pertama (primer). Data primer merupakan sumber penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli, tidak melalui perantara. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode *survey* yaitu dengan cara mengirimkan kusioner kepada kantor SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang berada di Kota Medan secara langsung, agar dapat diterima langsung oleh subjek penelitian yaitu pegawai sub bagian keuangan. Data primer diperoleh dengan menggunakan daftar pertanyaan yang

telah terstruktur dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi dari pegawai yang bekerja di SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Pemerintah Daerah Kota Medan sebagai responden dalam penelitian.

3.6 Teknik Analisis Data

Menurut Ghozali (2016), “Analisis data dilakukan secara kuantitatif dengan model regresi linear berganda yang bertujuan untuk menjelaskan kekuatan dan memberikan pengaruh beberapa variabel independen (X) terhadap suatu variabel dependen (Y). Untuk mendapatkan perhitungan yang tepat, peneliti menggunakan program komputer yang khusus untuk membantu pengelolaan statistik, yaitu program *SPSS (Statistical Packages for Social Sciences)*”.

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif

Menurut Ghozali (2012), “Analisis deskriptif ini bertujuan untuk mengetahui gambaran Anggaran Berbasis Kinerja (X1), Akuntabilitas (X2) dan Transparansi (X3) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah (Y)”.

3.6.2 Uji Kualitas Data

1) Uji Validitas

Menurut Ghozali (2015), “Uji ini digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan dan kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut”.

2) Uji Reabilitas

Menurut Ghozali (2016), “Mengemukakan bahwa uji reabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang

terhadap pertanyaan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Suatu variabel dikatakan reliabel jika nilai $\bar{\alpha} > 0,60$ ".

Pengukuran realibilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *one shot* atau pengukuran sekali saja. Disini pengukuran hanya sekali saja dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur reliabilitas dengan uji statistik *Cronbach Alpha* ($\bar{\alpha}$).

3.6.3 Uji Asumsi Klasik

Menurut Ghozali (2016), "Salah satu syarat yang mendasari penggunaan model regresi adalah dipenuhinya semua asumsi klasik, agar pengujian lebih efisien". Uji asumsi klasik yang digunakan adalah:

- 1) Memiliki Distribusi Normal.
- 2) Tidak terjadi Multikolinieritas antar variabel independen.
- 3) Tidak terjadi Heteroskedastisitas atau varian variabel pengganggu yang konstan (Homoskedastisitas).
- 4) Tidak terjadi autokorelasi antar residual setiap variabel independen.

1) Uji Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah regresi, variabel dependen, variabel independen atau kedua-duanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Pada uji normalitas penelitian ini, digunakan metode Grafik *Normality P-Plot*, *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test*, dan Histogram.

Dalam uji Grafik *Normality Probability Plot*, ketentuan yang digunakan adalah:

- a) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

b) Jika data menyebar jauh dari diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Menurut Ghozali, (2016), Jika data tidak normal, ada beberapa cara mengubah model regresi menjadi normal adalah:

- a) Lakukan transformasi data, misalnya mengubah data menjadi bentuk logaritma (Log) atau natural (ln).
- b) Menambah jumlah data.
- c) Menghilangkan data yang dianggap sebagai penyebab tidak normalnya data.
- d) Menerima data apa adanya.

Pemilihan metode ini didasarkan bahwa *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test* merupakan metode yang umum digunakan untuk menguji normalitas data. Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah sampel yang digunakan berdistribusi normal atau tidak, dengan membuat hipotesis sebagai berikut:

Ho: Data terdistribusi normal

Ha: Data terdistribusi tidak normal

Jika $\sigma > 0,05$, maka H_a ditolak dan H_o diterima.

Jika $\sigma < 0,05$, maka H_a diterima dan H_o ditolak.

Menurut Ghozali (2016), “Pengujian dengan model histogram memiliki ketentuannya bahwa data normal berbentuk lonceng. Data yang baik adalah data yang memiliki pola distribusi normal”.

2) Uji Multikolinieritas

Menurut Santoso (2016), “Tujuan uji multikolinieritas adalah menguji apakah pada sebuah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen”. Jika dalam model regresi terjadi korelasi, maka terdapat masalah

multikolinearitas. Metode yang digunakan untuk mendeteksi multikolinearitas dalam penelitian ini adalah *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Batas *tolerance value* ≤ 0.1 dan $VIF \geq 10$.

a) H_0 : *Tolerance* $> 0,10$ dan $VIF < 10$, tidak terdapat multikolinearitas.

b) H_1 : *Tolerance* $< 0,10$ dan $VIF > 10$, terdapat multikolinearitas.

3) Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2016), “Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variabel dari residual atau pengamatan ke pengamatan lain. Jika dalam satu pengamatan ke pengamatan lainnya memiliki variabel tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas”. Ada beberapa cara untuk mendeteksi atau tidaknya heteroskedastisitas dengan melihat grafik *Scatter Plot* antara nilai prediksi variabel terkait yaitu ZPRED dengan nilai residualnya SRESID lewat program SPSS dengan pengambilan keputusan.

a) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk suatu pola yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka telah terjadi heteroskedastisitas.

Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka terjadi homoskedastisitas.

3.6.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Menurut Ghozali (2016), Analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh beberapa variabel independen (X) terhadap satu variabel dependen (Y) yaitu:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Dimana:

Y = Kinerja Keuangan Pemerintah

X1 = Anggaran Berbasis Kinerja

X2 = Akuntabilitas

X3 = Transparansi

a = Konstanta, besar nilai Y jika X = 0

b_1 - b_2 = Koefisien arah regresi, yang menyatakan perubahan nilai Y apabila terjadi perubahan nilai X.

e = *Standard Error*

3.6.5 Uji Hipotesis

Menurut Ghozali (2016), “Uji hipotesis ini digunakan untuk menguji adanya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen baik secara simultan maupun parsial, yang menggunakan uji t dan uji F”.

a. Uji t (Uji Parsial)

Menurut Ghozali (2016), “Untuk menentukan tingkat signifikan secara parsial antara masing-masing variabel bebas dengan variabel tak bebas, maka hipotesis harus diuji dengan uji – t pada taraf signifikan sebesar $\alpha = 5\%$ secara dua arah (*two tail*)”. Uji statistik t yang digunakan untuk membuktikan apakah terdapat pengaruh antara masing-masing variabel independen (X) dan variabel dependen (Y).

Setelah dilakukan uji hipotesis (uji t) maka kriteria yang ditetapkan yaitu dengan membandingkan t tabel dengan t hitung yang diperoleh berdasarkan tingkat signifikan (α) tertentu dengan derajat kebebasan ($df = n-k$).

Kriteria untuk mengambil keputusan adalah sebagai berikut:

- 1) Jika angka signifikan $\geq 0,05$, maka H_0 diterima.
- 2) Jika angka signifikan $\leq 0,05$, maka H_0 ditolak.

Apabila H_0 diterima, maka hal ini menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen dan sebaliknya apabila H_0 ditolak, maka variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

b. Uji F (Uji Simultan)

Menurut Sugiyono (2010), “Pengujian secara simultan dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen mampu menjelaskan variabel dependennya, maka dilakukan uji hipotesis secara simultan dengan menggunakan uji statistik F”.

Setelah mendapat F_{hitung} ini, kemudian dibandingkan dengan nilai F_{tabel} dengan nilai signifikan sebesar 0,05 atau 5%, artinya kemungkinan besar dari hasil penarikan kesimpulan memiliki probabilitas 95% atau kolerasi kesalahan sebesar 5% yang mana akan diperoleh suatu hipotesis dengan syarat:

1. Jika angka signifikan $\geq 0,05$, maka H_0 diterima.
2. Jika angka signifikan $\leq 0,05$, maka H_0 ditolak.

3.6.6 Koefisien Determinasi (*Adjusted R Square*)

Santoso (2012) menyatakan bahwa, “Koefisien determinasi (R^2) dari hasil regresi berganda menunjukkan seberapa besar variabel dependen bias dijelaskan oleh variabel-variabel independen. Dalam penelitian ini menggunakan koefisien determinasi (*Adjusted R²*) dapat diketahui derajat ketepatan dari analisis linear

berganda menunjukkan seberapa jauh variabel bebas mampu menjelaskan pengaruh terhadap variabel terikat”.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Pemerintah Kota Medan

Dilihat dari sejarahnya, Sumatera Utara sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda yang saat itu masih bernama Dilihat *Gouverment Van Sumatra* dengan luas wilayah yang meliputi seluruh pulau Sumatera dan dipimpin oleh satu pemerintah daerah (Gubernur) yang berpusat dikota Medan. Namun pasca Kemerdekaan Indonesia, Provinsi Sumatera sendiri dibagi menjadi tiga provinsi berbeda yakni Sumatera Utara, Sumatera Tengah, serta Sumatera Selatan yang kemudian memiliki hak untuk mengatur daerahnya masing-masing. Sementara itu Sumatera Utara sendiri merupakan gabungan dari tiga sub wilayah yakni Karesidenan Aceh, Karesidenan Sumatera Timur, dan Karesidenan Tapanuli. Provinsi Sumatera Utara berada di bagian barat Indonesia, terletak pada garis 10 – 40 Lintang Utara dan 980 – 1000 Bujur Timur. Pada sebelah utara berbatasan dengan provinsi Aceh, pada sebelah Timur dengan Negara Malaysia di Selat Malaka, pada sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Riau dan Sumatera Barat, dan pada sebelah Barat, Sumatera Utara berbatasan dengan Samudera Hindia.

Daratan Provinsi Sumatera Utara memiliki Luas 71.680,68 km² , daratan provinsi Sumatra Utara adalah 71.680,68 Km² , sebagian besar berada di daratan pulau Sumatera dan sebagian kecil berada di Pulau Nias, pulau-pulau Batu, dan juga beberapa pulau kecil, baik dibagian Barat maupun dibagian Timur pantai

pulau Sumatera. Daerah yang paling luas di Sumatera Utara menurut Kabupaten/Kota adalah daerah Kabupaten Mandailing Natal yang memiliki luas 6.620,70 km², atau sekitar 9,23% dari keseluruhan luas Sumatera Utara, kemudian diikuti dengan Kabupaten Langkat yang memiliki luas 6.263,29 km² atau 8,74%, lalu selanjutnya Kabupaten Simalungun dengan luas 4.386,60 km² atau sekitar 6,12%. Sedangkan luas daerah yang terkecil adalah Kota Sibolga dengan luas 10,77 km² atau sekitar 0,02% dari keseluruhan luas wilayah Provinsi Sumatera Utara. Pada umumnya Provinsi di Indonesia, Provinsi Sumatera Utara juga memiliki musim kemarau dan musim penghujan. Musim penghujan biasanya terjadi pada bulan November sampai pada bulan Maret, dan Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Juni sampai dengan bulan September. Diantara kedua musim penghujan dan kemarau diselingi oleh musim pancaroba.

a. Visi Pemerintah Kota Medan

Visi merupakan gambaran tentang apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang. Dikaitkan dengan pembangunan daerah, visi sekretariat Kota Medan pada dasarnya di reduksi dari visi misi kepala daerah terpilih. Oleh karenanya, visi dari Pemerintah Kota Medan adalah, “Terwujudnya masyarakat Medan yang berkah, maju dan kondusif”.

b. Misi Pemerintah Kota Medan

1. MEDAN BERKAH

Mewujudkan Kota Medan sebagai Kota yang berkah dengan memegang teguh nilai-nilai keagamaan dan menjadikan Medan sebagai kota layak huni juga berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.

2. **MEDAN MAJU**

Memajukan masyarakat Kota Medan melalui revitalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan yang modern, terjangkau oleh semua.

3. **MEDAN BERSIH**

Menciptakan keadilan sosial melalui reformasi birokrasi yang bersih, profesional, akuntabel dan transparan berlandaskan semangat melayani masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata.

4. **MEDAN MEMBANGUN**

Membangun sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi lokal masyarakat yang berkeadilan agar terciptanya lapangan kerja, iklim kewirausahaan yang sehat dan peningkatan kualitas SDM.

5. **MEDAN KONDUSIF**

Mewujudkan kenyamanan dan iklim kondusif bagi segenap masyarakat Kota Medan melalui peningkatan supremasi hukum berbasis partisipasi masyarakat.

6. **MEDAN INOVATIF**

Mewujudkan Kota Medan sebagai kota ekonomi kreatif dan inovatif yang berbasis pada penguatan human capital, teknologi digital sosial budaya.

7. **MEDAN BERIDENTITAS**

Mewujudkan Kota Medan yang beradab, santun, harmonis, toleran dalam kemajemukan demokratis dan cinta tanah air.

4.1.2 Karakteristik Responden

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara menyebar kuesioner pada Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) Kota Medan. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 60 responden. Responden dalam penelitian ini adalah seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) koordinator keuangan. Dari kuisioner yang disebarakan maka diperoleh hasil karakteristik responden sebagai berikut:

Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Keterangan	Jumlah	Presentase
1.	Laki-laki	27	45 %
2.	Perempuan	33	55 %
Jumlah		60	100 %

Sumber: Diolah Peneliti (2021)

Berdasarkan tabel 4.1 di atas menunjukkan bahwa jumlah responden berdasarkan jenis kelamin yang terbanyak adalah berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 33 responden (55%), sedangkan berjenis kelamin laki-laki sebanyak 27 responden (45%).

Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

No	Keterangan	Jumlah	Presentase
1	DIII	15	25 %
2	S1	45	75 %
Jumlah		60	100 %

Sumber: Diolah Peneliti (2021)

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa pendidikan responden DIII sebesar (25%) dengan jumlah responden sebanyak 15 responden dan yang memiliki pendidikan S1 (75%) dengan jumlah responden sebanyak 45 responden. Dengan demikian Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjadi responden lebih dominan ke tingkat pendidikan S1.

Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

No	Keterangan	Jumlah	Presentase
1	< 25 Tahun	15	25 %
2	26 s.d 35 Tahun	30	50 %
3	36 s.d 45 Tahun	8	13,3 %
4	> 46 Tahun	7	11,7 %
Jumlah		60	100 %

Sumber: Diolah Peneliti (2021)

Dari tabel 4.3 dapat dilihat bahwa dari seluruh responden di Pemerintah Daerah Kota Medan lebih di dominasi oleh pegawai yang berusia < 25 tahun sebanyak 15 orang (25%) kemudian 26-35 tahun sebanyak 30 orang (50%), sedangkan yang berusia 36-45 tahun sebanyak 8 orang (13,3%) dan yang berusia > 46 tahun yakni sebanyak 7 orang (11,7%). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa secara umum pegawai di Pemerintah Daerah Kota Medan merupakan pegawai yang produktif dan masih semangat dalam bekerja.

Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja

No	Keterangan	Jumlah	Presentase
1	1-10 Tahun	32	53,3 %
2	11-20 Tahun	15	25 %
3	>20 Tahun	13	21,6 %
Jumlah		60	100 %

Sumber: Diolah Peneliti (2021)

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan bahwa, 32 responden atau sebanyak 53,3% mempunyai masa kerja 1-10 tahun, dimana mayoritas dari para pegawai berada pada masa kerja yang produktif.

4.1.3 Uji Kualitas Data

a) Uji Validitas

Untuk mendapatkan data primer peneliti melakukan penyebaran kuisisioner kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) bagian keuangan yang bekerja di Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD), sebelum kuisisioner disebarkan kepada 40 responden, penulis terlebih dahulu melakukan *try out* kepada 20 orang responden dengan memberikan 30 butir pertanyaan yang dibagi menjadi 4 variabel yaitu Kinerja Keuangan Pemerintah (Y), Anggaran berbasis Kinerja (X1), Akuntabilitas (X2) dan Transparansi (X3) untuk menguji valid dan reliabelnya seluruh pernyataan tersebut. Hasil uji validitas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas Anggaran Berbasis Kinerja (X1)

No	Butir Pernyataan	R _{hitung}	R _{tabel}	Keterangan
1	X1.1	0.974	0.210	Valid
2	X1.2	0.918	0.210	Valid
3	X1.3	0.910	0.210	Valid
4	X1.4	0.896	0.210	Valid
5	X1.5	0.912	0.210	Valid
6	X1.6	0.943	0.210	Valid
7	X1.7	0.927	0.210	Valid
8	X1.8	0.923	0.210	Valid

Sumber: Diolah Peneliti (2021)

Jika r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} dan nilai positif maka butir pernyataan atau indikator tersebut dinyatakan valid. Jika $r_{hitung} >$ dari r_{tabel} (pada taraf signifikansi 5%) maka pernyataan tersebut dinyatakan valid.

Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas Akuntabilitas (X2)

No	Butir Pernyataan	R _{hitung}	R _{tabel}	Keterangan
1	X2.1	0.891	0.210	Valid
2	X2.2	0.945	0.210	Valid
3	X2.3	0.859	0.210	Valid
4	X2.4	0.812	0.210	Valid
5	X2.5	0.795	0.210	Valid
6	X2.6	0.984	0.210	Valid

Sumber: Diolah Peneliti (2021)

Jika r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} dan nilai positif maka butir pernyataan atau indikator tersebut dinyatakan valid. Jika $r_{hitung} >$ dari r_{tabel} (pada taraf signifikansi 5%) maka pernyataan tersebut dinyatakan valid.

Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas Transparansi (X3)

No	Butir Pernyataan	R _{hitung}	R _{tabel}	Keterangan
1	X3.1	0.991	0.210	Valid
2	X3.2	0.955	0.210	Valid
3	X3.3	0.851	0.210	Valid
4	X3.4	0.977	0.210	Valid
5	X3.5	0.931	0.210	Valid
6	X3.6	0.941	0.210	Valid
7	X3.7	0.966	0.210	Valid
8	X3.8	0.947	0.210	Valid
9	X3.9	0.997	0.210	Valid

Sumber: Diolah Peneliti (2021)

Jika r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} dan nilai positif maka butir pernyataan atau indikator tersebut dinyatakan valid. Jika $r_{hitung} >$ dari r_{tabel} (pada taraf signifikansi 5%) maka pernyataan tersebut dinyatakan valid.

Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas Kinerja Keuangan Pemerintah (Y)

No	Butir Pernyataan	R_{hitung}	R_{tabel}	Keterangan
1	Y.1	0.973	0.210	Valid
2	Y.2	0.942	0.210	Valid
3	Y.3	0.946	0.210	Valid
4	Y.4	0.970	0.210	Valid
5	Y.5	0.556	0.210	Valid
6	Y.6	0.957	0.210	Valid

Sumber: Diolah Peneliti (2021)

Jika r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} dan nilai positif maka butir pernyataan atau indikator tersebut dinyatakan valid. Jika $r_{hitung} >$ dari r_{tabel} (pada taraf signifikansi 5%) maka pernyataan tersebut dinyatakan valid.

b) Uji Reliabilitas

Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *one shot* atau pengukuran sekali saja. Disini pengukuran hanya sekali saja dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur reliabilitas dengan uji statistik *Cronbach Alpha* ($\bar{\alpha}$) (Ghozali, 2015).

Tabel 4.9 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach Alpha</i> ($\bar{\alpha}$)	N Of Item
Kinerja Keuangan Pemerintah	0.849	8
Anggaran Berbasis Kinerja	0.951	6
Akuntabilitas	0.954	9
Transparansi	0.955	6

Sumber: Diolah Peneliti (2021)

Berdasarkan hasil tabel 4.9 diatas, diketahui bahwa semua pernyataan dari variabel Kinerja Keuangan Pemerintah (Y), Anggaran Berbasis Kinerja (X1). Akuntabilitas (X2) dan Transparansi (X3) memiliki nilai *Cronbach Alpha* ($\bar{\alpha}$) yang lebih besar dari 0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua pernyataan

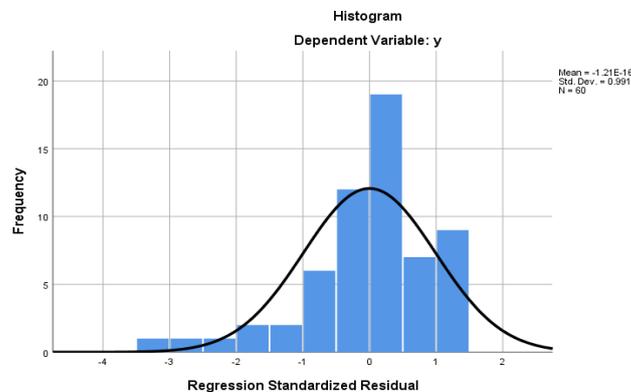
yang digunakan untuk variabel Kinerja Keuangan Pemerintah (Y), Anggaran Berbasis Kinerja (X1). Akuntabilitas (X2) dan Transaparansi (X3) dalam penelitian ini adalah reliabel.

4.1.4 Uji Asumsi Klasik

a) Uji Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2015).

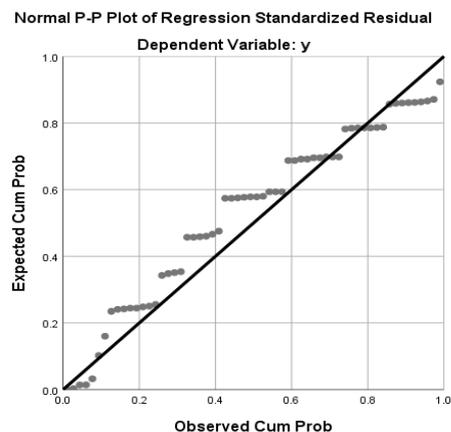
Gambar 4.1 Grafik Histogram



Sumber: Hasil Olahan SPSS (2021)

Berdasarkan gambar 4.1 di atas, terlihat bahwa data bergerak mengikuti arah garis sehingga membentuk lonceng yang berarti bahwa data berdistribusi normal atau model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Gambar 4.2 Grafik Normality P-plot



Sumber: Hasil Olahan SPSS (2021)

Berdasarkan gambar 4.2 di atas, terlihat bahwa penyebaran data (titik) menyebar diagonal dan mengikuti arah garis diagonal yang berarti bahwa data berdistribusi normal atau model regresi memenuhi asumsi normalitas.

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.92814196
Most Extreme Differences	Absolute	.075
	Positive	.041
	Negative	-.075
Test Statistic		.075
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		

Sumber: Hasil Olahan SPSS (2021)

Berdasarkan hasil uji normalitas, variabel penelitian menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,200 yang berarti lebih tinggi dari nilai signifikansi yaitu sebesar 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

b) Uji Multikolinearitas

Menurut Ghazali (2015), “Uji multikolinieritas diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan antar variabel independen dalam suatu model”. Selain itu untuk uji ini juga untuk menghindari kebiasaan dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengaruh pada uji parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Jika VIF yang di hasilkan diantara 1-10 maka tidak terjadi multikolinieritas. Output nya tampak pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.11 Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Anggaran_Berbasis_Kinerja	.891	1.122
	Akuntabilitas	.897	1.115
	Transparansi	.899	1.001

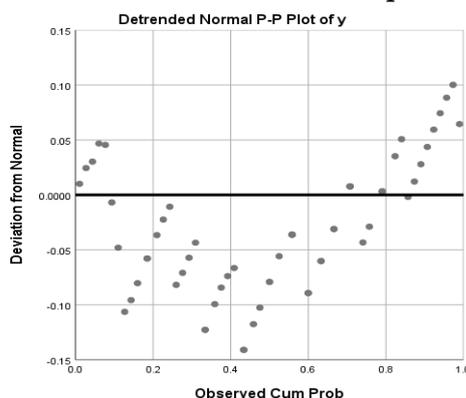
a. Dependent Variable: Kinerja_Keuangan_Pemerintah

Sumber: Hasil Olahan SPSS (2021)

c) Uji Heteroskedastisitas

Heterokedastisitas menguji terjadinya perbedaan *variance* residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain. Cara memprediksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dengan pola gambar *Scatterplot*, regresi yang tidak terjadi heteroskedastisitas jika:

1. Titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0.
2. Titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja.
3. Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali.
4. Penyebaran titik-titik data tidak berpola.

Gambar 4.3 Grafik Scatterplot

Sumber: Hasil Olahan SPSS (2021)

Pada gambar 4.3 terlihat bahwa titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y dan tidak terlihat pola tertentu. Dengan demikian pada

persamaan regresi linear berganda dalam model ini tidak ada gejala atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

d) Uji Autokorelasi

Menguji autokorelasi dalam suatu model bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara variabel pengganggu pada periode tertentu dengan variabel sebelumnya. Untuk data *time series* autokorelasi sering terjadi. Tapi untuk data yang sampelnya *crosssection* jarang terjadi karena variabel pengganggu satu berbeda dengan lainnya. Mendeteksi autokorelasi dengan menggunakan nilai *durbin-watson* dibandingkan dengan tabel *durbin-watson* (d_l dan d_u). Kriteria jika $d_u < d_{hitung} < 4-d_u$ maka tidak terjadi autokorelasi.

Tabel 4.12 Uji Autokorelasi Model Summary^b

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.803 ^a	.586	.644	.14803	2.482
a. Predictors: (Constant), Y					
b. Dependent Variable: X1, X2, X3					

Sumber: Hasil Olahan SPSS (2021)

Berdasarkan pengujian tersebut, maka diperoleh nilai *Durbin Watson* untuk persamaan regresi yang diajukan sebesar 2,482. Nilai *Durbin-Watson* menurut tabel dengan n (jumlah data penelitian) = 60 dan k (jumlah variabel independen) = 3 didapat angka $d_l = 1,4797$ dan $d_u = 1,6889$. Hal ini sesuai ketentuan $d_u < d < (4 - d_u)$, yaitu $1,6889 < 2,482 < 3,1686$ yang menunjukkan tidak terjadi autokorelasi antar residual.

4.1.5 Analisis Regresi Linear Berganda

Menurut Ghozali (2015), “Analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini dilakukan untuk meramalkan bagaimana hubungan variabel independen dengan variabel dependen”. Hasil uji regresi ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.13 Regresi Linear Berganda Coefficients^a

Coefficients ^a				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	-.899	7.582	
	Anggaran_Berbasis_Kinerja	.345	.157	.273
	Akuntabilitas	.332	.105	.395
	Transparansi	.350	.096	.432
a. Dependent Variable: Kinerja_Keuangan_Pemerintah				

Sumber: Hasil Olahan SPSS (2021)

Dari tabel 4.13 di atas dapat dirumuskan suatu persamaan regresi untuk mengetahui pengaruh anggaran berbasis kinerja, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja keuangan pemerintah sebagai berikut:

$$Y = -0,899 + 0,345 X_1 + 0,332 X_2 + 0,350 X_3$$

Koefisien persamaan regresi linear berganda di atas dapat diartikan sebagai:

- 1) Jika sesuatu pada variabel independen dianggap konstan, maka nilai kinerja keuangan pemerintah sebesar -0,899.
- 2) Nilai koefisien regresi anggaran berbasis kinerja sebesar 0,345, yang berarti setiap kenaikan anggaran berbasis kinerja sebesar 1% akan meningkatkan nilai kinerja keuangan pemerintah sebesar 0,345%, dengan catatan variabel lain dianggap tetap.
- 3) Nilai koefisien regresi akuntabilitas sebesar 0,332, yang berarti setiap peningkatan akuntabilitas sebesar 1% akan meningkatkan nilai kinerja keuangan pemerintah sebesar 0,332%, dengan catatan variabel lain dianggap tetap.
- 4) Nilai koefisien regresi transparansi sebesar 0,350, yang berarti setiap peningkatan transparansi sebesar 1% akan meningkatkan nilai kinerja keuangan pemerintah sebesar 0,350%, dengan catatan variabel lain dianggap tetap.

4.1.6 Uji Hipotesis

1) Uji Parsial (Uji-t)

Ghozali (2015) menjelaskan bahwa, “Uji t-statistik diperlukan untuk melihat nyata tidaknya pengaruh variabel yang dipilih terhadap variabel yang diteliti. Uji t-statistik digunakan untuk menguji pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial”. Dengan menguji satu arah dalam tingkat signifikansi = α dan $df = n-k$ (n =jumlah observasi, k =jumlah parameter) maka hasil pengujian akan menunjukkan:

1. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ pada $\alpha 0.05$, maka H_1 ditolak dan H_0 diterima.
2. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ pada $\alpha 0.05$, maka H_1 diterima dan H_0 ditolak.

Tabel 4.14 Uji Statistik Parsial (Uji-t)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.751	7.582		2.658	.013
	Anggaran_Berbasis_Kinerja	.345	.157	.273	3.384	.002
	Akuntabilitas	.332	.105	.395	3.160	.004
	Transparansi	.350	.096	.432	3.655	.001

a. Dependent Variable: Kinerja_Keuangan_Pemerintah

Sumber: Hasil Olahan SPSS (2021)

Tabel 4.14 di atas menunjukkan hasil uji statistik t antara variabel independen dengan variabel dependen. Berikut adalah penjelasannya:

1. Variabel anggaran berbasis kinerja memiliki nilai t_{hitung} sebesar 3,384 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,002 dan t_{tabel} sebesar 1,670 dengan $df = 60$ pada taraf 0,05. Tingkat signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 yang berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga dapat dikatakan bahwa variabel anggaran berbasis kinerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah.
2. Variabel akuntabilitas memiliki nilai t_{hitung} sebesar 3,160 dengan tingkat

signifikansi sebesar 0,004 dan t_{tabel} sebesar 1,670 dengan $df = 60$ pada taraf 0,05. Tingkat signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 dan nilai beta yang dihasilkan adalah positif besar 0,332 yang berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga dapat dikatakan bahwa variabel akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah

3. Variabel transparansi memiliki nilai t_{hitung} sebesar 3.655 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,001 dan t_{tabel} sebesar 1,670 dengan $df = 60$ pada taraf 0,05. Tingkat signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 yang berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga dapat dikatakan bahwa variabel transparansi berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah.

Jadi, berdasarkan hasil pengujian regresi secara parsial pada tabel diatas menunjukkan bahwa variabel anggaran berbasis kinerja (X1), akuntabilitas (X2) dan transparansi (X3) berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah (Y).

2) Uji Simultan (Uji-F)

Secara simultan, pengujian hipotesis dilakukan dengan uji-F (*F test*). Uji-F dilakukan untuk menguji apakah variabel-variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Uji ini dilakukan dengan membandingkan signifikansi F-hitung dengan ketentuan:

- 1) Jika $F_{\text{hitung}} < F_{\text{tabel}}$ pada $\alpha 0.05$, maka H_1 ditolak dan H_0 diterima.
- 2) Jika $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$ pada $\alpha 0.05$, maka H_1 diterima dan H_0 ditolak.

Tabel 4.15 Uji Simultan (Uji-F)

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	41.832	3	13.944	14.304	.027 ^b
	Residual	222.558	59	9.273		
	Total	264.390	60			

a. Dependent Variable: Kinerja_Keuangan_Pemerintah
b. Predictors: (Constant), X1, X2, X3

Sumber: Hasil Olahan SPSS (2021)

Setelah uji-F dilakukan, maka diperoleh nilai F_{hitung} dan nilai signifikansi. Nilai F_{hitung} sebesar 14,304 sedangkan F_{tabel} sebesar 2,76 dengan df pembilang = 3, df penyebut = 60 dan taraf signifikan $\alpha = 0.05$ sehingga $F_{hitung} > F_{tabel}$. Dengan demikian maka H_1 ditolak dan H_0 diterima. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara anggaran kinerja keuangan (X1), akuntabilitas (X2), dan transparansi (X3) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah (Y). Pada Tabel 4.15 dapat dilihat bahwa tingkat signifikansi sebesar $0.000 <$ dari taraf yang ditentukan $\alpha = 0.05$ mengindikasikan bahwa X1, X2, dan X3 secara bersama- sama berpengaruh signifikan terhadap Y.

4.1.7 Koefisien Determinasi R^2 (*Adjusted R-Square*)

Nilai koefisien korelasi (R) menunjukkan seberapa besar korelasi atau hubungan antara variabel-variabel independen dengan variabel dependen. Koefisien korelasi dikatakan kuat jika nilai R berada di atas 0.5 dan mendekati nilai 1. Koefisien determinasi (R^2) menunjukkan seberapa besar variabel independen menjelaskan variabel dependennya. Nilai *R square* adalah nol sampai dengan satu. Apabila nilai *R square* semakin mendekati satu, maka variabel-variabel independen memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Sebaliknya, semakin kecil nilai *R square*, maka kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi

variabel dependen semakin terbatas. Nilai *R square* memiliki kelemahan yaitu nilai *R square* akan meningkat setiap ada penambahan satu variabel independen meskipun variabel independen tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dengan demikian, nilai adjusted R square digunakan untuk mengevaluasi mana model regresi terbaik.

Tabel 4.16 Koefisien Determinasi R²

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.803 ^a	.586	.644	.14803	2.482
a. Predictors: (Constant), Y					
b. Dependent Variable: X1, X2, X3					

Sumber: Hasil Olahan SPSS (2021)

Dilihat dari tabel 4.16 koefisien determinasi (R^2) menunjukkan angka *Adjusted R Square* 0,644 atau 64,4% yakni berarti variasi variabel kinerja keuangan pemerintah (Y) dapat dijelaskan oleh variabel anggaran berbasis kinerja (X1), akuntabilitas (X2) dan transparansi (X3), sisanya 35,6% dapat dijelaskan oleh variabel lain diluar dari variabel penelitian.

4.2 Pembahasan

Hasil uji regresi linier berganda yang di dapat adalah anggaran berbasis kinerja (X1), akuntabilitas (X2) dan transparansi (X3) berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah (Y). Berikut adalah pembahasan dari hasil uji penelitian:

1. Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja (X1) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah (Y)

Variabel anggaran berbasis kinerja (X1) memiliki nilai t_{hitung} sebesar 3,384 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,002 dan t_{tabel} sebesar 1,670 dengan $df = 60$ pada taraf 0,05. Tingkat signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 yang berarti H_0

ditolak dan H_1 diterima sehingga dapat dikatakan bahwa variabel anggaran berbasis kinerja (X1) berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah (Y).

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa hipotesis pertama diterima yang menyatakan bahwa, variabel anggaran berbasis kinerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah Kota Medan. Hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian yang dilakukan Alamri (2014) yang menyatakan bahwa, “Penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif dan signifikan pada kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara”.

Anggaran yang memiliki basis dan hasil serta memiliki efisiensi dalam pencapaian hasilnya merupakan sebuah kinerja yang didalamnya terdapat penyusunan anggaran dengan menghubungkan pendanaan. Keluaran dan hasil tersebut telah diterapkan dalam target setiap unit kerja dalam pemerintahan.

Seperti pada teori keagenan dimana pemerintah sebagai agen harus dapat menerangkan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, hasil serta manfaat yang diperoleh masyarakat sebagai prinsipal dari suatu kegiatan atau program yang dianggarkan. Setiap masyarakat memiliki hak dan juga akses yang sama dengan pemerintah dalam mengetahui proses penganggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama terkait dengan pemenuhan kebutuhan hidup setiap masyarakat. Masyarakat juga mendapat hak yang sama untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana atau pelaksanaan anggaran tersebut.

2. Pengaruh Akuntabilitas (X2) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah (Y)

Variabel akuntabilitas (X2) memiliki nilai t_{hitung} sebesar 3,160 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,004 dan t_{tabel} sebesar 1,670 dengan $df = 60$ pada taraf 0,05. Tingkat signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 dan nilai beta yang dihasilkan adalah positif besar 0,332 yang berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga dapat dikatakan bahwa akuntabilitas (X2) berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah (Y).

Hasil penelitian ini membenarkan hipotesis kedua yang menyatakan bahwa, akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah Kota Medan. Hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian yang dilakukan Dewi Selviani (2018) yang menyatakan bahwa, “Akuntabilitas kinerja berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kota Cimahi”.

Akuntabilitas menjadi kewajiban pemegang amanah atau agen dalam hal ini yaitu pemerintah untuk bertanggungjawab, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk pertanggungjawaban tersebut.

Secara tidak langsung akuntabilitas berkaitan dengan laporan keuangan pemerintah dan dengan adanya akuntabilitas maka Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertanggungjawab untuk menyajikan laporan keuangan pemerintahan diwajibkan bekerja keras dalam penyampaian laporan keuangan tersebut. Akuntabilitas ini juga akan menuntut pihak-pihak pembuat laporan keuangan tidak sembarangan dalam tanggungjawab yang dijalankannya.

3. Pengaruh Transparansi (X3) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah (Y)

Variabel transparansi memiliki nilai t_{hitung} sebesar 3.655 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,001 dan t_{tabel} sebesar 1,670 dengan $df = 60$ pada taraf 0,05. Tingkat signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 yang berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga dapat dikatakan bahwa variabel transparansi berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah.

Hasil penelitian ini membenarkan hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa, transparansi berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah Kota Medan. Hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian yang dilakukan Deddy Saiful Akbar (2016) yang menyatakan bahwa, variabel transparansi berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah.

Transparansi adalah bentuk keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan. Adanya transparansi di setiap kebijakan tata kelola pemerintahan, maka keadilan (*fairness*) dapat ditumbuhkan.

Transaparansi juga sangat berpengaruh dalam laporan keuangan pemerintah dan kinerja keuangan pemerintahan. Sebagai agen, pemerintah dalam melaksanakan pemerintahan harus melakukan keterbukaan dalam penyampaian laporan keuangan agar tidak terjadinya kecurangan dan dapat timbul rasa kepercayaan pada prinsipal yaitu masyarakat dalam tata kelola pemerintahan.

4. Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja (X1), Akuntabilitas (X2) dan Transparansi (X3) Terhadap Kinerja keuangan Pemerintah (Y)

Nilai F_{hitung} sebesar 14,304 sedangkan F_{tabel} sebesar 2,76 dengan df pembilang = 3, df penyebut = 60 dan taraf signifikan $\alpha = 0.05$ sehingga $F_{hitung} > F_{tabel}$. Dengan demikian maka H_1 ditolak dan H_0 diterima. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara anggaran kinerja keuangan (X1), akuntabilitas (X2), dan transparansi (X3) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah (Y).

Hasil penelitian ini membenarkan hipotesis keempat yang menyatakan bahwa, anggaran berbasis kinerja, akuntabilitas dan transparansi secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah Kota Medan. Hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian yang dilakukan Ana Muchlisa (2017) yang menyatakan bahwa, anggaran berbasis kinerja dan transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menjelaskan kewajiban setiap instansi pemerintah untuk menyusun dan melaporkan penggambaran strategi tentang program atau kegiatan pokok yang akan dicapai 1-5 tahun, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi setiap instansi dan jajarannya. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan fungsi instansi tersebut tidak ada menyinggung mengenai peran laporan keuangan instansi yang seharusnya menjadi dasar penyusunan LAKIP, sementara semua program yang diselenggarakan pemerintah berfokus pada keuangan atau pendanaan.

Instansi pemerintah yang berkewajiban untuk menerapkan akuntabilitas kinerja dan menyampaikan pelaporannya adalah instansi dari pusat, pemerintah daerah atau kota. Sedangkan yang bertanggung jawab dalam penyusunan LAKIP adalah pejabat yang melayani fungsi administrasi di instansi tersebut. Sementara pimpinan bersama tim bertanggung jawab untuk mempertahankan. Penyusunan LAKIP juga harus mengikuti prinsip-prinsip yang wajar yaitu laporan harus disusun secara objektif dan transparan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh anggaran berbasis kinerja, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja keuangan pemerintah Kota Medan. Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan pengujian yang telah dilakukan terhadap 60 responden dengan menggunakan model regresi linear berganda, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Anggaran berbasis kinerja (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah (Y) Kota Medan.
2. Akuntabilitas (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah (Y) Kota Medan.
3. Transparansi (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah (Y) Kota Medan.
4. Anggaran berbasis kinerja (X1), akuntabilitas (X2) dan transparansi (X3) secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah (Y) Kota Medan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian tersebut, maka penulis mengemukakan saran yang dapat bermanfaat bagi Pimpinan Instansi Pemerintah Kota Medan selaku pengguna anggaran harus lebih memperhatikan setiap program yang dilaksanakan agar dapat meningkatkan pencapaian target sesuai dengan yang ditetapkan sebelumnya. Pengguna anggaran harus lebih berfokus

pada penggunaan anggaran agar lebih ekonomis dan tepat sasaran serta efisien dan efektif agar setiap program yang sedang dilaksanakan dapat selesai tepat pada waktunya dan tidak ada pekerjaan yang tertunda bahkan terhenti karena ketidaktersediaan dana atau masalah lainnya terkait dengan anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Halim. dan Muhammad, Iqbal. (2012). *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Jogjakarta : Penerbit UPP AMP YKPN.
- Abdul, Halim. dan Syam, Kusufi. (2017). *Teori Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat.
- Akbar, D.S. (2018). *Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja*. Jurnal Wawasan dan Riset Akuntansi, 6 (1): 36-44.
- Adnyana, Putra. (2013). *Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Hubungan Antara Kinerja Dengan Nilai Perusahaan*. E-Journal Universitas Udayana. Vol. 5 No. 3.
- Ardila, Isna, Ayu Anindya Putri. (2015). *Analisis Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Value for Money Pada Pengadilan Tebing Tinggi*. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis. Vol.15.No.1.
- Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, (2008). *Pengukuran Kinerja*. Suatu Tinjauan pada Instansi Pemerintah. Jakarta.
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Medan. (2015). *Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015*. Medan. <http://bpkad.pemkomedan.go.id/>
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Medan. (2016). *Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016*. Medan. <http://bpkad.pemkomedan.go.id/>
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Medan. (2017). *Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017*. Medan. <http://bpkad.pemkomedan.go.id/>
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Medan. (2018). *Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018*. Medan. <http://bpkad.pemkomedan.go.id/>
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Medan. (2019). *Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019*. Medan. <http://bpkad.pemkomedan.go.id/>
- Bastian, Indra. (2016). *Sistem Akuntansi Sektor Publik Edisi 3*. Jakarta : Salemba Empat.
- Barus, M. D., asyrafy, H., nababan, E., & mawengkang, H. (2018, January). *Routing and scheduling optimization model of Sea transportation*. In *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering* (Vol. 300, No. 1, p. 012011). IOP Publishing.
- Dedy Aries Poae, David P. E. Saerang. (2013). *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitasnya Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Talaud*. Jurnal Accountability Vol. 2 No. 1, Juni 2013.

- Devas. (2007). *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta : Penerbit Gramedia Pustaka Utama.
- Djamarah, Syaiful Bahri. (2012). *Psikologi Belajar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Djayasinga, Marselina. (2015). *Membedah APBD*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Garrison, Noreen, Brewer. (2013). *Akuntansi Manajerial*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ghozali, Imam. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8)*. Cetakan ke VIII. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunawan, Dimas Rizky. (2016). *Penerapan Sistem E-Budgeting terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Publik (Studi Pada Pemerintah Kota Surabaya)*. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 8 (1) (2016).
- Hery. (2015). *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Center For Academic Publishing Services.
- Irham, Fahmi. (2018). *Pengantar Manajemen Keuangan*, Bandung: Alfabeta.
- Ismail, N. (2019). *Kewenangan Dekonsentrasi Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Daerah*. *Gorontalo Law Review*, 2 (1): 24-32. Jakarta : Legalitas.
- Irawan, I. (2020). *Perencanaan Keuangan Dan Manajemen Biaya Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Pelaku Usaha Di Desa Timbang Jaya Kecamatan Bahorok Langkat Sumatera Utara*. *IHSAN: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT*, 2(2), 278-289.
- Kasmir. (2012). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Khodacheck, I. dan Timoshinko, K. (2017). *Russian Central Government Budgeting and Public Sector Reform Discourses: Paradigms, hybrids, and a "Third Way"*. *International Journal of Public Administration*, 41 (5-6): 460-477.
- Moh Khusaini. (2018). *Keuangan Daerah*. Malang : Ub Press.
- Lukito Penny Kusumastuti. (2014). *Membumikan Transparansi Dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik : Tantangan Demokrasi Ke Depan*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta.
- Kuswandi, A. (2016). *Manajemen Pemerintah Daerah*. Bekasi: Badan Penerbit Universitas Islam 45.
- Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Edisi Kedua. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Penerbit UPP STIM YKPN.
- Mahsun, M. (2014). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.

- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan: Edisi Revisi*. Andi: Yogyakarta.
- Martini, R., Lianto, N., Hartati, S., Zulkifli, dan Widyastuti, E. (2019). *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kecamatan Sembawa*. Jurnal Akademi Akuntansi.
- Mauro, S.G., Cinquini, L. dan Grossi, G. (2017). *Insights Into Performed Based Budgeting In The Public Sector : A Literatur Review and A Reserch Agenda*. *Public Management Review*, 19 (7): 911-931.
- Mauro, S.G., Cinquini, L. dan Sinervo, L.M. (2019). *Actors Dynamics Toward Performed Based Budgeting : A Mix of Change and Stability?*. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*, 31 (2): 158-177.
- Munandar. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung.
- Nafarin, M. (2015). *Penganggaran Perusahaan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Natalia, S., Irina, O. dan Yuriy, H. (2019). *The Managerial Issues of State Budgets Execution: The Case of Ukraine and Kazakhstan*. *Polish Journal of Management Studies*, 19 (1): 445-463.
- Nordiawan, Deddi dan Ayuningtyas Hertianti. (2014). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nasution, N. A., & Oktari, A. (2021). Pengaruh cash flow, account receivable turnover, modal kerja dan pertumbuhan penjualan terhadap likuiditas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 11(2), 91-115.
- Republik Indonesia. (1999). Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Jakarta: Legalitas.
- Republik Indonesia. (2003). Undang-undang No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Jakarta: Legalitas.
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Jakarta: Legalitas.
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta: Legalitas.
- Republik Indonesia. (2005). Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Legalitas.
- Republik Indonesia. (2011). Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011. Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Legalitas.

- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Jakarta: Legalitas.
- Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Legalitas.
- Santoso, Singgih. (2012). *Panduan Lengkap SPSS Versi 20*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Sasongko dan Parulian. (2015). *Anggaran*. Jakarta: Salemba Empat.
- Setiana, N. D., & Yuliani, N. L. (2018). *Pengaruh Pemahaman dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, (April)*.
- Sugiyono. (2010). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta.
- Suliyanto. (2018). *Metode Penelitian Bisnis Untuk Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Yogyakarta: Andi.
- Sari, P. B., & Dwilita, H. (2018). *Prospek Financial Technology (Fintech) Di Sumatera Utara Dilihat Dari Sisi Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan Dan Kemiskinan*. *Kajian Akuntansi*, 19(1), 09-18.
- Tahir, Muh. (2011). *Pengantar Metode Penelitian Penelitian Pendidikan*. Makasar: Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Yunita dan Chirtianingrum. (2018). *Measurement of Accountability Management of Village Funds*. *Jurnal facultas of Economy University of Bangka Belitung*, Vol. 2 No. 1, hal 100- 102.